



LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DAN
PERANCIS DALAM MEMENUHI *MINIMUM ESSENTIAL FORCE*
(MEF) TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
TAHAP 2 (2015 - 2019)**

UTARYO SANTIKO

MARIA DAVINA AGUSTIEN

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Tahun 2020**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)**

Judul Penelitian : Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Perancis dalam Memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahap 2 (2015 - 2019)

Kepala Peneliti

Nama Lengkap : Utaryo Santiko
NIDN :
Jabatan Fungsional : -
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional
Nomor HP : 0811572045
Alamat Email : utaryo@dsn.moestopo.ac.id

Anggota Peneliti

Nama Lengkap : Maria Davina Agustien
NIDN : -
Jabatan Fungsional : -
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional
Nomor HP : 087777336383
Alamat Email : mariadavinaagustien@gmail.com

Jakarta 1 Juli 2020

**Mengetahui,
KAPUSLITDIANMAS**

Yasef Firmansyah, M.Si

KEPALA PENELITIAN



Utaryo Santiko, M.Si

**Menyetujui,
DEKAN**

Prof. Dr. Himsar Silaban, MM

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Halaman Sampul | |
| Lembar Pengesahan | i |
| Daftar Isi | ii |
| Ringkasan | iv |
| Bab I | |
| Pendahuluan | 1 |
| I.1. Latar Belakang | 1 |
| I.2. Perumusan Masalah | 6 |
| I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| Bab II | |
| Tinjauan Pustaka | 9 |
| II.1. Penelitian Terdahulu | 9 |
| II.2. Rerangka Pemikiran | 13 |
| Bab III | |
| Metode Penelitian | 20 |
| III.1. Jenis Penelitian | 20 |
| III.2. Sifat Penelitian | 20 |
| III.3. Teknik Pengumpulan Data | 21 |
| III.4. Asumsi | 21 |
| III.5. Hipotesa | 22 |
| Bab IV | |
| Pembahasan | 23 |
| IV.1. Industri Pertahanan Perancis | 23 |
| IV.2. Hubungan Bilateral Indonesia-Perancis | 29 |
| IV.2.A. Kemitraan Strategis | 29 |
| IV.2.B. Kerja sama Industri Pertahanan | 36 |
| IV.3. Pemenuhan MEF Tiga Matra TNI | 54 |
| IV.3.A. TNI AD | 57 |
| IV.3.B. TNI AL | 61 |
| IV.3.C. TNI AD | 64 |
| IV.4. Efektivitas dalam Memenuhi Target MEF | 66 |
| Tahap II | |

| | | |
|------------------|----------------|----|
| Bab V | Penutup | 74 |
| | A. Kesimpulan | 74 |
| | b. Rekomendasi | 76 |
| Daftar Referensi | | 77 |

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dari kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis dalam memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) Periode 2015 - 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pencarian data melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian metode dalam pengukuran yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis dalam memenuhi MEF adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teori transformasi militer menurut Andrew Krepinevich. Hasil Penelitian menemukan bahwa kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis cukup signifikan dan efektif dalam membantu Indonesia mencapai transformasi militer melalui *Minimum Essential Force* (MEF), namun masih perlu ditingkatkan kembali pada sektor – sektor tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, tatanan dalam hubungan internasional terus mengalami perkembangan. Kemampuan militer negara-negara tetangga menguat secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Republik Indonesia, hal ini semakin membawa posisi Indonesia terancam dalam Hubungan Internasional. Oleh karena itu kebutuhan akan modernisasi dan transformasi dalam rangka pembangunan nasional untuk menciptakan bangsa yang kuat dan berdaya saing, semakin layak untuk diprioritaskan. Tidak hanya pada sektor ekonomi dan infrastruktur, melainkan pada sektor pertahanan nasional yang menjadi ujung tombak bagi Indonesia untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal ancaman baik pada lingkup regional maupun internasional. Selain dari pada itu, kebutuhan akan transformasi dan modernisasi juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan untuk membangun militer Indonesia yang professional dan menjadi kekuatan nasional yang mampu menjalankan fungsinya dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Untuk terwujudnya hal tersebut, kemudian perlu dibuat kebijakan strategis yang terfokus dan mendalam.

Dalam upaya melakukan pembaharuan dalam sistem pertahanan khususnya pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan pembangunan postur pertahanan, Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan banyak negara salah satunya adalah Perancis. Indonesia dan Perancis pada dasarnya telah

menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan antar kedua negara terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan hubungan bilateral antara Perancis dengan Indonesia tidak luput dari kepentingan masing-masing negara. Bagi Perancis, Indonesia merupakan mitra strategis dalam upaya menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik sebagai Zona lalu lintas perekonomian dunia. Perancis melihat Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN, memiliki peran yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, peningkatan kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan dengan Perancis dapat menjadi peluang bagi Indonesia menggali setiap potensi dalam mengembangkan kekuatan pertahanan negara dalam berbagai sektor, mengingat industri pertahanan Perancis juga terus mengalami perkembangan yang signifikan. Selain itu, kesamaan prinsip dalam menjalankan politik luar negeri antara politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan *Politique Independence France*, menciptakan kenyamanan bagi kedua negara dalam meningkatkan kerjasama (France Diplomatie, 2018).

Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Perancis pada dasarnya telah terbagi dalam beberapa sektor kerjasama, diantaranya adalah mengenai kerjasama teknik militer dalam hal ini terkait dengan pelatihan bersama dan pengembangan personel militer, *Mutual Protection on Clasified Information* yakni mengenai intelijen, *cyber security*, *military cooperation* dimana pada sektor ini ditingkatkan mengenai kerjasama militer dalam menjaga keamanan baik darat, laut maupun udara, dan yang terakhir adalah mengenai kerjasama dalam pengadaan peralatan, logistik dan industri pertahanan. Kerjasama dalam pengadaan peralatan , logistik

dan industri pertahanan telah mencapai kesepakatan berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditanda tangani di Paris, Perancis 11 Juli 1996. Nota kesepahaman atau MoU tersebut terus diperbaharui dengan melalui proses pengkajian setiap 5 tahun sekali. Melalui nota kesepahaman tersebut, kerjasama mengenai pengadaan peralatan, logistik dan industri pertahanan antara Indonesia dengan Perancis terus mengalami pengembangan, terlebih pada tahun 2012 telah disepakati dibentuknya *Indonesian France Defence Dialogue* (IFDD) sebagai forum dialog yang mengkaji setiap kerjasama yang telah dijalankan setiap tahunnya untuk kemudian menjadi wadah bagi kedua negara menyampaikan ide -ide dalam meningkatkan kerjasama di masa yang akan datang (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

Menindak lanjuti hasil-hasil pertemuan *Indonesian-France Defence Dialogue* (IFDD), pada 29 Maret 2017, presiden Perancis Francois Hollande, melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dengan didampingi beberapa menteri termasuk menteri pertahanan Perancis Jean-Yves Le Drian, dalam pertemuan resmi di istana negara. Di hadapan kedua kepala negara, Indonesia-Perancis menandatangani *Letter of Intent* (LoI) antara Menteri Pertahanan RI dan Perancis. Dalam LoI tersebut telah disepakati antara lain serangkaian kerjasama pertahanan, termasuk kerjasama antar angkatan laut dan udara diantaranya peluang dalam pengadaan dan operasional kapal permukaan, kapal selam, pesawat dan lain sebagainya (Kementerian Pertahanan RI, 2017). Sebagai bentuk upaya merealisasikan hal tersebut, kemudian dibentuk kelompok kerja terkait alusista laut dan udara. Selain itu, dalam rangka kerjasama industri pertahanan, kedua negara

menyepakati dilaksanakannya *Transfer of Technology* (ToT) maupun produksi bersama dalam setiap pengadaan alutsista (Kementerian Pertahanan RI, 2017).

Bagi Indonesia sendiri, dalam melakukan modernisasi alutsista dan pembangunan postur pertahanan negara, dirumuskan sebuah rencana strategis guna memenuhi kekuatan pokok minimum/*minimum essential force* (MEF). Revolusi pada sektor pertahanan ini dilakukan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025, disebutkan mengenai visi pembangunan pertahanan dan keamanan jangka panjang yakni dengan mewujudkan kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala ancaman serta menciptakan kondisi aman, damai, tertib dan tentram masyarakat. Kemudian melalui visi tersebut, ditentukan 20 poin arah kebijakan jangka panjang baik dalam bidang pertahanan maupun keamanan. Pada bidang pertahanan diantaranya mencakup pembangunan dalam sistem pertahanan yang lebih meningkatkan peran masyarakat dalam bela negara, perlindungan wilayah yurisdiksi baik air maupun udara, pemberdayaan TNI dan peningkatan Alat Utama Sistem Senjata (Bappenas RI, 2019). Jika dilihat dalam lingkup geopolitik dan geostrategis, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sehingga potensi ancaman terhadap Indonesia sangat besar dan dalam hal ini tentunya diperlukan pertahanan yang kuat. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004 – 2009) disebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi kemudian adalah, Indonesia belum memiliki kebijakan strategis yang matang dan mendalam

dimana Indonesia mengesampingkan kekuatan pendukung dan hanya terfokus pada kekuatan utama. Selain itu, kemajuan Indonesia dalam bidang pertahanan juga terhambat pada kurangnya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan TNI dan buruknya kondisi alutsista yang terhambat pada embargo yang dilakukan oleh negara *supplier* dan anggaran pertahanan yang kurang memadai (Bappenas RI, 2019).

Untuk mengatasi kurangnya kebijakan strategis yang matang dan mendalam, dalam RPJMN 2004-2009 kemudian dirumuskan mengenai *Strategic Defence Review* (SDR) sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan pertahanan sehingga dapat lebih mendalam dan menyeluruh. Pada SDR tahun 2009 dijabarkan mengenai pokok pikiran dan langkah-langkah untuk memenuhi kekuatan pokok minimum pertahanan atau disebut dengan *Minimum Essential Force* (MEF), yang telah tercatat pada Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 2 tahun 2010. MEF kemudian ditetapkan pada RPJMN tahun 2010-2014 sesuai dengan Peraturan Persiden No. 5 tahun 2010 dengan dibagi dalam 3 (tiga) tahap, tahap pertama adalah 2010-2014, tahap kedua 2015-2019 dan tahap ketiga 2020-2024. Dirumuskannya *Minimum Essential Force* (MEF) tidak mengarah pada perlombaan senjata/ *arm race* maupun dimaksudkan untuk memenangkan perang total, melainkan dimaksudkan sebagai postur ideal negara dimana tujuannya adalah sebagai respon ancaman baik ancaman aktual maupun ancaman mendatang, membangun *Confident Building Measures* (CBM), sebagai bentuk penangkalan terhadap ancaman dan menjadi manajemen pertahanan sebagai pedoman bagi kebijakan postur pertahanan. *Minimum Essential Force* (MEF) memiliki 4 (empat) strategi

yakni dengan melakukan rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan. Dalam hal pengadaan, diharapkan semua produk berasal dari industri dalam negeri, apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri harus disertai dengan *Transfer of Knowledge (ToK)* dan *Transfer of Technology (ToT)* yang sesuai dengan rencana kerja dan kesepakatan kerjasama (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis dalam memenuhi *Minimum Essential Force (MEF)* Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2015-2019. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Perancis yang sudah terjalin cukup lama yakni sejak 1950, membawa kedua negara kepada fase kerjasama yang lebih erat dari tahun ke tahunnya. Hubungan kerjasama yang terus meningkat antar kedua negara ini terus berlangsung hingga saat ini dimana Indonesia tengah membangun kekuatan pokok minimum pertahanan negara.

Perancis yang merupakan bagian dari Uni Eropa, terus mengalami peningkatan dalam sektor industri dan teknologi, maka bagi Indonesia bekerjasama dengan Perancis merupakan suatu langkah yang baik dalam upaya memenuhi kekuatan pokok minimum sebagaimana sudah direncanakan dalam rencana pembangunan negara. Tak hanya bagi Indonesia, Perancis juga mendukung kemitraan strategis antar kedua negara. Dari sini kemudian akan dilihat apakah

kerjasama antar kedua negara ini berjalan secara efektif dalam memenuhi kekuatan pokok minimum pertahanan Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis memilih periode tahun 2015-2019. Pada periode ini, *Minimum Essential Force* (MEF) memasuki tahap kedua, yang juga disertai peningkatan yang signifikan dalam kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijadikan sebagai batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ***“Bagaimana Efektivitas Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis dalam Memenuhi Minimum Essential Force (MEF) Tentara Nasional Indonesia tahun 2015-2019”***

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui seperti apa hubungan bilateral yang terjalin dalam kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerjasama industri pertahanan dalam memenuhi kekuatan pokok minimum pertahanan Indonesia atau *Minimum Essential Force* (MEF) 2015-2019.

Manfaat dari Penelitian ini adalah

1. Manfaat akademis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Perancis dapat mendukung pemenuhan kekuatan pokok minimum

pertahanan Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian lain.

2. Manfaat praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama pertahanan dengan negara lain secara lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Penelitian Terdahulu

Dalam membuat suatu penelitian, diperlukan adanya referensi untuk membedakan penelitian tersebut dengan penelitian lainnya. Begitu pula halnya dengan penelitian ini, beberapa diantaranya adalah: Artikel Jurnal yang berjudul “Analisis *Minimum Essential Force* (MEF) Dalam Rangka Pembangunan *Cyber-Defense*” yang ditulis pada tahun 2015 oleh Alex Firmansyah Rahaman, Syaiful Anwar dan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari dari Universitas Pertahanan. Jurnal ini berisi tentang analisis mengenai postur *Minimum Essential Force* (MEF) terhadap pembangunan cyber – defense di Indonesia. Bagi para penulis, MEF saat ini lebih fokus pada upaya pemenuhan modernisasi alat utama sistem senjata pada konteks *Revolution in Military Affairs* (RMA) bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Rahman, Anwar, & Sumari, 2015). Jurnal diatas berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada upaya pemenuhan MEF dalam melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) melalui kerjasama peralatan, logistik dan industri pertahanan Indonesia dengan Perancis.

Selanjutnya, atrikel jurnal yang berjudul “Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Turki : Studi Kasus Kerjasama Industri Pertahanan” yang ditulis pada tahun 2016 oleh Muhammad Rizky Amrullah dari Universitas Pertahanan. Jurnal ini berisi tentang hubungan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Turki. Dalam Konteks ini, praktik diplomasi pertahanan Indonesia berupa kerjasama pertahanan dengan Turki dalam bidang industri pertahanan. Jurnal ini menjawab

pertanyaan mengenai faktor yang mendasari mengapa Indonesia menjalin kerjasama industri pertahanan yang strategis dengan Turki dibandingkan dengan negara dengan industri pertahanan yang lebih maju (Amrullah, 2016).

Berikutnya, dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan tahun 2008, buku ini menjelaskan mengenai kondisi pertahanan Indonesia, buku ini memaparkan upaya – upaya yang telah dilaksanakan maupun yang dirancang untuk menciptakan stabilitas nasional maupun kawasan melalui berbagai sektor dalam lingkup keamanan dan pertahanan. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa kerjasama pertahanan menjadi salah satu substansi penting yang akan berkembang. Perkembangan penting dalam kerjasama pertahanan yang kemudian akan terjadi adalah peningkatan hubungan yang signifikan dengan beberapa negara. Buku ini memberikan gambaran mengenai motif Indonesia membangun kerjasama yang lebih erat dengan Perancis (Kementerian Pertahanan RI, 2008).

Kemudian, jurnal berjudul “Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia: Menuju Pemenuhan Target MEF atau Sekedar Menuju *Arm Candy*?” karya Lukman Fahmi Djarwono, menjelaskan mengenai tujuan dari pengembangan industri pertahanan di Indonesia. Bagi penulisnya, selama belum ada definisi yang jelas mengenai “keamanan nasional”, pembentukan postur pertahanan yang ideal masih sulit diterapkan. Oleh karena itu, pencapaian MEF masih akan menghasilkan kesenjangan kemampuan. Kesenjangan ini akan dapat berkurang dengan memiliki industri pertahanan nasional yang solid, jurnal artikel ini mengeksplorasi peran

industri pertahanan nasional untuk mencapai MEF, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan kemampuan di Indonesia (Djarwono, 2017).

Selanjutnya, artikel jurnal berjudul “Permasalahan dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan” karya Radhana Dwi Wibowo, menjelaskan mengenai keinginan Indonesia melaksanakan kemandirian pertahanan. Namun, ternyata hal tersebut belum bisa terwujud disebabkan beberapa faktor permasalahan, diantaranya permasalahan dari implementasi konsep tiga pilar pelaku industri pertahanan, permasalahan dari implementasi konsep kluster industri pertahanan dan permasalahan imbal dagang, kandungan lokal dan offset atas pengadaan alat peralatan dan keamanan dari luar negeri. Selain menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, artikel jurnal ini juga menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, hal ini memberi gambaran bagi penulis mengenai kondisi industri pertahanan di Indonesia (Wibowo, 2016).

Berikutnya, tesis yang berjudul *Implementasi Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia* yang dibuat pada tahun 2012 karya R. Mokhammad Luthfi dari Universitas Indonesia, menjelaskan mengenai pembangunan postur pertahanan berbasis kekuatan pokok minimum/*minimum essential force* (MEF) tahun 2010-2014 yang dianalisis melalui konsep *Revolution in Military Affairs (RMA)* dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Tesis ini menganalisis sejauh mana wacana RMA diadopsi dalam pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut dengan melihat kepada perubahan tiga dimensi yakni teknologi, doktrin dan organisasi militer Indonesia. Tesis ini memberikan gambaran

bagi penulis dalam melihat apakah konsep RMA yang dicita – citakan Indonesia apakah betul-betul diangkat dalam proses pemenuhan kekuatan pokok minimum pertahanan Indonesia (Luthfi, 2012).

Kemudian, *Report* dari *The Ministry of Armed Force France, Defence and National Security Strategic Review* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Perancis tahun 2017, memberikan gambaran bagi penulis mengenai kondisi pertahanan dan keamanan Perancis. Buku ini menjelaskan mengenai tantangan – tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan strategis bagi negara Perancis maupun kawasan Uni Eropa. Selain memberikan gambaran mengenai tantangan yang harus diselesaikan, buku ini menjelaskan bagaimana Upaya Perancis dalam menghadapi tantangan tersebut (The Ministry of The Armed Forces France, 2017).

Berikutnya adalah dokumen kementerian pertahanan Perancis mengenai *France and Security in the Indo-Pacific*, dokumen ini menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya diharapkan Perancis melalui hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa wilayah Indo-Pasifik yang memegang 60% populasi dunia dan berada pada posisi ketiga dalam perdagangan internasional merupakan wilayah yang sangat krusial. Krisis dan konflik yang terjadi di wilayah tersebut dapat mempengaruhi stabilitas internasional. Untuk itu, menjaga perdamaian di wilayah Indo-Pasifik merupakan bagian dari fokus Perancis juga Uni Eropa. Dokumen ini memberikan gambaran bagi penulis bagaimana pola kerjasama khususnya pada bidang pertahanan yang dilakukan Perancis terhadap negara-negara di wilayah

Indo-Pasifik. Melalui dokumen ini, penulis dapat melihat kepentingan Perancis dalam meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara di wilayah Indo-Pasifik khususnya Indonesia (Ministere Des Armees France, 2018).

Selanjutnya, Report dari *Armament Industry European Research Group* tahun 2017 berjudul “*Defence Industrial Links Between The EU and The US*” yang ditulis oleh Jean Belin, Keith Hartley, Sophie Lafeez, Hilmar Linnenkamp, Martin Lundmark, Helene Masson, Jean-Pierre Maulny dan Alessandro R. Ungaro, menjelaskan mengenai hubungan industri pertahanan Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana Perancis membangun industri pertahanannya, hingga memiliki salah satu industri pertahanan terkemuka di dunia. Dalam mengembangkan industri pertahanannya, Perancis tetap mempertahankan otonomi strategisnya sehingga ketergantungan terkait teknologi dan kemampuan pada Amerika Serikat tetap terbatas (Belin, et al., 2017).

Yang terakhir, buku berjudul “*Military Transformation and Modern Warfare*” yang ditulis pada tahun 1965 oleh Elinor Camille Sloan. Buku ini membahas mengenai definisi dari transformasi militer dan bagaimana transformasi militer tersebut kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat, China dan Russia. Buku ini menjadi panduan bagi penulis dalam menganalisis bentuk – bentuk dari transformasi militer (Sloan, 1965).

II.2. Rerangka Pemikiran

Revolution In Military Affairs

Globalisasi membawa dunia kepada perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya pada aspek keamanan dan pertahanan, mulai dari keamanan individu hingga kepada pertahanan negara. Pada aspek pertahanan negara, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi kebijakan pertahanan sebuah negara termasuk didalamnya adalah mengenai strategi keamanan dan sifat perang. Salah satu contohnya adalah pada kemenangan Amerika Serikat atas Irak dalam Perang Teluk pertama dan kedua sejak saat itu RMA kental dengan dominasi teknologi Amerika (Matthews, 2001). Perang tersebut menunjukkan bahwa perang dapat dimenangkan oleh pihak yang memiliki keunggulan teknologi. Peristiwa tersebut oleh para ahli dalam studi keamanan, didefinisikan sebagai awal mula *Revolution in Military Affairs* (RMA) mulai berjalan (Luthfi, 2012).

Konsep RMA merupakan perluasan dari ide yang dikembangkan oleh ahli teori militer Uni Soviet yang dikembangkan pada awal 1970-an, yang disebut dengan *Military Technical Revolution* (MTR). Kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa fokus para ahli teori militer Uni Soviet adalah pada revolusi teknologi militer. Konsep mengenai MTR mendapat dukungan keras dari Marshal Nikolai Orgakov, Kepala Staf Umum Soviet (1977), ia berpendapat bahwa kombinasi senjata berteknologi tinggi dan adaptasi dalam organisasi dan doktrin merupakan ketidaksinambungan yang perlu direvolusi (Cuoco, 2010). Mengadopsi argumen Orgakov, Andrew Marshall (1998) seorang pendukung utama pemikiran RMA, berpendapat bahwa *Revolution in Military Affairs* (RMA) merupakan perubahan besar dalam sifat perang yang disebabkan oleh pengaplikasian teknologi baru yang inovatif, dikombinasikan dengan perubahan dramatis pada doktrin

militer dan konsep operasional dan organisasi secara fundamental mengubah karakter dan perilaku operasi militer (Schneider & Grinter, 1998). Pandangan mengenai RMA yang diutarakan oleh Andrew Marshall kemudian sejalan dengan pandangan modern yang diutarakan oleh Krevinevich (2007) dimana ia menyatakan bahwa RMA muncul pada saat penggunaan teknologi baru ke dalam sistem militer yang digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif dan adaptasi organisasional yang merubah karakter dan terjadinya sebuah konflik secara mendasar. Hal ini kemudian terjadi dengan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan pertempuran dan efektivitas militer suatu angkatan bersenjata (Krepinevich, 1994). Kemudian yang terakhir adalah pandangan dari Richard O. Hundley dalam bukunya *Past Revolutions Future Transformations What Can The History of Revolutions in Military Affairs Tell Us About Trasforming the U.S military?* Mendefinisikan RMA sebagai Kemampuan mendasar yang menyediakan fondasi untuk serangkaian peningkatan kemampuan militer (Hundley, 1999).

Ketiga pandangan mengenai RMA yang diuraikan diatas, penulis gunakan untuk menganalisis bagaimana seharusnya RMA diimplementasikan. Dari perdebatan diatas dapat dilihat bahwa RMA diciptakan bukan hanya dengan meningkatkan penggunaan teknologi untuk menciptakan senjata pintar (*smart weapon*), melainkan menciptakan perubahan dalam doktrin dan organisasi. Terdapat tiga karakteristik RMA, diantaranya adalah penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk efektivitas pertempuran, persenjataan yang dimiliki harus memiliki kriteria *precision guided weapons; stealth; space*

technology; integrated weapons system, kemudian organisasi militer tidak harus besar melainkan terlatih, *professional* dan *fleksible* (multi-peran), dan setiap matra harus terintegrasi dalam sebuah doktrin gabungan (*joint doctrine*).

Pembangunan Industri Pertahanan

Jurnal pertahanan milik Andi Widjajanto, menjelaskan mengenai tiga model dalam membangun industri pertahanan, yang pertama adalah *Autarky Model* yang biasanya diterapkan oleh negara-negara yang memiliki ambisi untuk mendapatkan kemandirian pertahanan. Namun, model ini hanya bisa dicapai oleh negara-negara dengan postur militer yang kuat, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dsb. Kemudian *Global Supply Chain Model*, hal ini dilakukan oleh negara-negara yang telah memiliki basis teknologi militer yang besar, namun tidak memiliki akses terhadap pasar senjata internasional, sehingga kemudian negara tersebut melakukan integrasi produksi senjatanya dengan konsorsium industri pertahanan global, contohnya Australia. Yang terakhir adalah *Niche-Production Model*, dimana hal ini dilakukan oleh negara yang berupaya mengurangi ketergantungan senjata terhadap produsen luar negeri dengan mengembangkan kapasitas nasional. Dalam penerapannya, suatu negara harus memiliki komitmen untuk melakukan investasi ke sektor industri pertahanan terutama dengan berupaya mendapatkan *Offset* dari produsen senjata yang mapan (Widjajanto, 2012).

Offset sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati oleh produsen persenjataan sebagai imbalan dari kesepakatan pembelian jasa dan barang – barang militer (Muradi, 2008). Terdapat

dua jenis *offset*, yang pertama adalah *offset* langsung atau *direct offset* dan *indirect offset* atau *offset* tidak langsung. *Offset* langsung diartikan sebagai barang – barang atau jasa yang langsung terkait dengan peralatan militer yang dijual. Terdapat tiga jenis *offset* langsung, yang pertama pembelian lisensi produksi, yakni penjual persenjataan setuju untuk mentransfer teknologinya kepada negara pembeli, sehingga keseluruhan atau sebagian barang yang dipesannya dapat diproduksi di negara pembeli. Kedua adalah produksi bersama (*co-production*), dimana pembeli dan penjual tidak hanya mengupayakan pengadaan barang – barang militer saja, melainkan membuat barang dan jasa peralatan militer. Ketiga adalah pengembangan bersama (*co-development*), yakni pengembangan bersama negara produsen peralatan persenjataan dengan negara pembeli berupaya mengembangkan berbagai peralatan pertahanan yang telah diproduksi oleh negara penjual, dengan harapan didapat produk yang lebih baik dari yang terdahulu, hal ini memberikan keuntungan bagi negara pembeli untuk secara aktif mengadopsi serta mentransfer berbagai teknologi persenjataan secara langsung maupun tidak langsung sehingga secara bertahap meningkatkan kemampuan SDM di negara pembeli dapat terukur dengan baik (Muradi, 2008).

Sedangkan *indirect offset* memiliki empat jenis, yang pertama adalah barter, dimana antara negara produsen dan konsumen diiringi perjanjian bahwa penjual peralatan pertahanan tersebut bersedia dibayar dengan produk Non-militer negara pembeli dengan nominal setara. Yang kedua imbal beli, yakni pemasok persenjataan setuju membeli atau menemukan pembeli produk non-militer dari negara konsumen dengan nominal yang telah ditentukan. Yang ketiga imbal

investasi dimana pemasok persenjataan setuju untuk terlibat atau menemukan pihak ketiga yang mau menanamkan modal langsung di negara pembeli dengan nilai tertentu dari proses jual-beli tersebut. Yang terakhir adalah *Buy Back*, yakni pemasok persenjataan setuju membeli kembali atau menemukan pihak ketiga untuk membeli produk militer negara konsumen yang jualnya dengan jangka waktu tertentu (Muradi, 2008). *Niche-Production Model* ini kemudian dapat dikatakan sebagai model yang diterapkan Indonesia dalam membangun industri pertahanan melalui MEF, dimana dalam pemenuhannya, ditetapkan kebijakan bahwa alutsista harus merupakan produksi dalam negeri dan jika berasal dari luar negeri maka harus disertai transfer teknologi. *Niche-Production Model* ini kemudian menjadi pengantar bagi Indonesia mencapai kemandirian pertahanan/*Autarky*.

Diplomasi Pertahanan

Kemudian untuk menganalisis hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Perancis, konsep yang digunakan adalah konsep diplomasi pertahanan. Kementerian Pertahanan Inggris dalam buku berjudul "*Joint Doctrine Publication 0-01 British Defence Doctrine*" mengartikan diplomasi pertahanan sebagai hubungan yang bertujuan untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dan membantu dalam pengembangan kekuatan yang bertanggung jawab, kompeten dan demokratis (UK Ministry of Defence, 2014). Pada dasarnya, dalam diplomasi pertahanan terdapat tiga varian utama, yang meliputi *Defense Diplomacy for Confident Building Measures*, *Defense Diplomacy for Defense Capabilities* dan *Defense Diplomacy for Defense Industry*. Varian yang digunakan dalam kerjasama Indonesia dan Perancis adalah *Defense Diplomacy for Defense Industry*, dimana diplomasi dilaksanakan dengan tujuan membangun dan

memperkuat industri pertahanan suatu negara. Hasil yang ditimbulkan dari diplomasi ini adalah independensi politik dan ekonomi sehingga menurunkan tingkat interdependensi atau ketergantungan suatu negara dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Pola kerjasama yang dilakukan dalam kerjasama ini antara lain dengan melalui kerjasama strategis antar kedua negara dalam produksi senjata, pengembangan dan penelitian senjata, pemberian lisensi, investasi dalam industri pertahanan serta *transfer of technology*. Pada akhirnya diplomasi pertahanan ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Efektivitas Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis dalam Memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2015 -2019” ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan data yang ada, lalu dilanjutkan dengan menganalisis data.

III.2. Sifat Penelitian

Pendekatan kualitatif berfokus pada penjelasan suatu fenomena sosial yang berarti penelitian kualitatif dapat membantu memahami dunia sosial dengan mencari jawaban dari beberapa pertanyaan seperti; mengapa manusia melakukan sesuatu, bagaimana opini dan perilaku yang terbentuk, bagaimana manusia terpengaruh dengan kejadian yang ada di sekitarnya, serta bagaimana dan mengapa budaya berkembang seperti saat ini. Dalam melakukan pengukuran untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan metode kuantitatif, dimana penulis melakukan pengukuran dengan menerjemahkan data kedalam bentuk angka.

III.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Field Research* (Penelitian Lapangan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengkombinasikan beberapa teknik antara lain; teknik *interview*, dokumentasi dan *survey*. Penulis menggunakan data primer berupa dokumen resmi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Perancis, data *evidence* mengenai kasus yang diteliti dari Kementerian Pertahanan RI dan data sekunder berupa buku, jurnal, wawancara, situs internet maupun skripsi/tesis yang relevan sesuai dengan bahasan penelitian ini.

Untuk melengkapi penelitian, penulis melakukan wawancara di Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Direktorat Teknik Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penulis mengumpulkan data berupa buku, jurnal, skripsi/tesis dari berbagai sumber kepustakaan seperti perpustakaan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Kementerian Pertahanan RI dan *Softcopy* dari *Google*.

III.4. Asumsi

Dalam penelitian ini dikemukakan asumsi sebagai berikut :

1. Upaya Indonesia untuk memenuhi target MEF memerlukan dukungan mitra dan kerjasama internasional;
2. Salah satu upaya Indonesia untuk memenuhi target MEF adalah dengan membangun industri pertahanan nasional Indonesia;

3. Perancis merupakan negara dengan industri pertahanan yang maju dan dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya secara mandiri;
4. Kerjasama industri pertahanan Indonesia dan Perancis dilakukan dalam bentuk *defense-offset* dan transfer teknologi.

III.5. Hipotesa

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dengan Perancis dalam memenuhi kekuatan pokok minimum pertahanan Indonesia/*minimum essential force* dapat dikatakan cukup efektif melihat Perancis mendukung penuh Indonesia dengan bersedia memberikan *Transfer of Technology* (ToT) dari berbagai alutsista rancangannya. Kemudian kerjasama ini berhasil membarikan kontribusi sebesar 45.6% pemenuhan kebutuhan alutsista TNI.

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1. Industri Pertahanan Perancis

Perancis merupakan salah satu negara yang secara pesat membangun sektor industri pertahanan nasionalnya. Pembangunan sektor industri pertahanan Perancis dimulai sewaktu Charles de Gaulle menjabat sebagai Presiden Perancis dengan membuat keputusan menarik Perancis dari Struktur militer NATO dan menunjukkan kemerdekaan nasional dengan membina industri pertahanan nasional sehingga mampu memproduksi sistem senjata utama (U.S. Congress of Technology Assesment, 1992). Perancis melakukan upaya menuju kemandirian pertahanan agar tidak bergantung pada NATO dengan melengkapi pasukan bersenjata oleh kemampuan industri pertahanan nasionalnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, Perancis mengembangkan senjata dengan tiga elemen berbeda antara lain :

- a. Penangkal Nuklir berdasarkan “Triad” : kapal selam, *bombers* dan rudal balistik;
- b. Pasukan darat dan udara konvensional yang sebagian besar melalui wajib militer untuk pertahanan negara dalam hal ini Tanah Air Perancis dan Eropa Tengah;
- c. *Rapid Action Force* Profesional yang besar, yang didirikan pada tahun 1983 dan *Blue-Water Navy* untuk intervensi dalam krisis luar negeri dengan lingkup terbatas dan intensitas, terutama di bekas jajahan Afrika, Perancis, Timur Tengah dan Teluk Persia.

Seperti Amerika Serikat, Perancis mendukung pembentukan militer yang besar untuk mengemban tanggung jawab di luar negeri, hal ini kemudian mencakup pembangunan sistem senjata utama yakni pesawat tempur, *tank* tempur, kapal selam bertenaga nuklir, kapal induk serta rudal balistik dan taktis. Selain itu, Perancis juga berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan militer kemudian mengabdikan sepertiga dari seluruh pengeluaran pemerintah untuk program-program pertahanan. Dalam prakteknya, Perancis membentuk Organisasi yang berperan dalam pengambilan keputusan utama mengenai proses akuisisi Industri Pertahanan Perancis yakni *Direction Generale de l'Armement* (DGA). DGA merupakan badan pengembangan dan pengadaan pertahanan nasional Perancis yang didirikan pada 1961. Organisasi ini mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua program dan pengadaan persenjataan Perancis kemudian menjadi penghubung antara industri pertahanan Perancis sebagai produsen dengan pemerintah. DGA kemudian mengendalikan semua penelitian, pengembangan dan produksi dan melakukan penelitian & pengembangan sendiri untuk semua dinas militer, hingga memantau kegiatan perusahaan nasional dan swasta yang terlibat dalam proses persenjataan. DGA merupakan bentuk strategi dasar dari Perancis untuk melakukan revolusi dalam industri pertahanannya. Selain melengkapi 90% kebutuhan persenjataan nasional, industri pertahanan Perancis juga melakukan ekspor ke lebih dari 25 negara pada masa Perang Dingin. Ekspor senjata ini secara tidak langsung berperan besar dalam kebijakan luar negeri Perancis dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu metode Perancis dalam menegaskan pertahanan dan kemerdekaan diplomatiknya. Selain dari pada itu, ekspor senjata

Perancis juga dipandang berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan baik dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet.

Perancis mengalami krisis ekonomi pada akhir 1980-an yang disertai kelebihan permintaan dalam ekspor senjata juga besarnya biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pelatihan dan pengembangan pertahanan. Sehingga kemudian Perancis harus melakukan rasionalisasi industri pertahanan, hal ini membawa Perancis pada sejumlah strategi yang matang dalam merestrukturisasi industri pertahanannya sambil mempertahankan asset teknologi inti dan memperkuat posisi kompetitifnya di pasar dunia. Sehingga, meskipun industri pertahanan Perancis merupakan yang terakhir melakukan adaptasi dengan era pasca perang dingin, namun dalam beberapa aspek, industri pertahanan Perancis mampu memimpin dalam teknologi pertahanan global (U.S. Congress of Technology Assesment, 1992). Keinginan Perancis untuk mengambil peran kepemimpinan dunia tercermin dalam proses mencapai kemandirian pertahanan ini, teknologi terkemuka yang dihasilkan oleh industri pertahanan Perancis antara lain teknologi pesawat, sistem ruang angkasa, rudal yang dipandu taktis, elektro-optik dan sistem angkatan laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang paling maju dalam pasar global. Melalui hal yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa upaya kemandirian yang dilakukan Perancis hampir total. Industri tradisional Perancis yang terkemuka pada masa itu adalah *Dessault Aviation*, *Direction des Constructions Navales* (DCN), *Eurocopter Group*, *SNECMA*, dsb. Perancis merestrukturisasi industri pertahanannya dengan menggabungkan industri-industri pertahanan yang semula hanya kemampuan yang

kecil pada sektor-sektor tertentu, menjadi satu kesatuan industri dengan potensi yang besar.

Delapan industri pertahanan Perancis, terdaftar sebagai bagian dari 100 industri pertahanan terbaik dunia pada tahun 1991. Penilaian tersebut diukur berdasarkan pendapatan tahunan setiap perusahaan yang terlibat. Kedelapan perusahaan milik Perancis memiliki pendapatan pertahanan yang jika digabungkan jumlahnya mencapai 13,8 miliar USD pada tahun 1991. Pada tahun 1995, Perancis mengalami masalah keuangan yang menyebabkan turunnya anggaran belanja pertahanan. Hal ini kemudian diiringi dengan kebutuhan modernisasi angkatan bersenjata untuk memenuhi konsep keamanan Perancis yang baru. Untuk itu, Perancis kemudian membentuk komite strategis yang berfungsi sebagai peninjau kembali pertahanan Perancis serta kebijakan dalam pengadaan pertahanan. Ekspor senjata yang dilakukan Perancis pada masa itu dipandang sangat diperlukan bagi keberlanjutan industri pertahanan Perancis di masa depan. Meskipun jumlah perusahaan milik Perancis yang masuk dalam 100 industri pertahanan terbaik dunia berkurang menjadi tujuh perusahaan pada tahun 1999, pendapatan gabungan dari ketujuh perusahaan tersebut meningkat menjadi 14,5 miliar USD. Tujuh perusahaan industri pertahanan Perancis yang terdaftar kala itu diantaranya adalah EADS, Thomson-CSF, DCN, Dassault Aviation, GIAT Industries, SNECMA dan SAGEM (Global Security, 2013).

Perancis memegang peran dalam industri pertahanan di kawasan Eropa. Perancis sangat mendukung pengembangan industri pertahanan di kawasan Eropa, terutama bersama Perancis sebagai pemimpin yang unggul dalam bidang tersebut.

Perancis melihat Jerman dan Inggris sebagai mitra kolaboratif terbaik dan memiliki beberapa program kerjasama dengan kedua negara tersebut. Perancis memandang tujuan utama dari program kerjasama dengan negara-negara Eropa merupakan upaya dalam berbagi biaya dan proses produksi yang lebih besar. Tujuan tersebut kemudian mengarah pada kebutuhan untuk menciptakan industri pertahanan Eropa yang terintegrasi, yang memutuskan pembagian kerja berdasarkan profitabilitas. Dalam basis industri bersama Eropa yang terkonsolidasi, Perancis berusaha mempertahankan posisi kepemimpinan dalam sektor – sektor yang memiliki fitur kekuatan teknologi mereka.

Pada tahun 1995, ekspor senjata yang dilakukan Perancis memenuhi seperempat jumlah keseluruhan transaksi senjata. Kemudian nilai ekspor senjata tersebut meningkat hingga 50% pada tahun 1996. Hal ini tidak sebanding dengan pembelian domestik yang cenderung stagnan. Kemudian pada 1997, ekspor senjata kembali meningkat 30% mewakili 40% dari total transaksi persenjataan Perancis. Restrukturisasi dalam industri pertahanan Perancis kemudian dilakukan pada tahun 2000an secara besar-besaran. Hal tersebut dilakukan sebagai reaksi terhadap pasar internasional yang semakin kompetitif. Munculnya kekuatan-kekuatan baru, dalam hal ini Israel, Rusia dan China yang diikuti negara-negara seperti Brasil, India, Pakistan dan kekuatan Asia lainnya, membuat industri pertahanan Perancis merasa diperlukannya perombakan yang lebih serius (Global Security, 2013).

Restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan Perancis tidak hanya dalam skala nasional melainkan dalam skala Eropa. Kendala dalam anggaran memaksa Pemerintah Perancis dan Industri Pertahanan Perancis melakukan semakin banyak strategi aliansi dengan Industri Pertahanan Eropa lainnya. Dinamika dalam perkembangan industri pertahanan Perancis terus terjadi, prestasi yang didapatkan

setiap industri senjata terus mengalami perputaran. Di masa kini, Perancis memiliki sejumlah industri pertahanan ternama dan diakui dunia yang sangat canggih dan kompetitif, beberapa perusahaan tersebut diantaranya seperti Thales, Airbus Defense & Space, Dessault, Airbus Helicopters, The Safran Group, DCNS, MBDA, Renault dan Nexter (International Trade Administration Department of Commerce USA, 2016)

Tabel IV.1.
*The SIPRI Top 15 Arms-Producing and Military Services Companies
in The World 2017*

| Rank^b | Top 15 arms producers | Arms sales (US\$ b.) | Total sales (US\$ b.) |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Lockheed Martin Corp. | 44.9 | 51.0 |
| 2 | Boeing | 26.9 | 93.4 |
| 3 | Raytheon | 23.9 | 25.3 |
| 4 | BAE Systems | 22.9 | 23.5 |
| 5 | Northrop Grumman Corp. | 22.4 | 25.8 |
| 6 | General Dynamics Corp. | 19.5 | 31.0 |
| 7 | Airbus Group | 11.3 | 75.2 |
| 8 | Thales | 9.0 | 17.8 |
| 9 | Leonardo | 8.9 | 13.0 |
| 10 | Almaz-Antey | 8.6 | 9.1 |
| 11 | United Technologies Corp. | 7.8 | 59.8 |
| 12 | L-3 Communications | 7.8 | 9.8 |
| 13 | Huntington Ingalls Industries | 6.5 | 7.4 |
| 14 | United Aircraft Corp. | 6.4 | 7.7 |
| 15 | United Shipbuilding Corp. | 5.0 | 5.6 |
| | | 231.6 | 455.6 |

Sumber : (Fleurant, Kuimova, Tian, Wezeman, & Wezeman, 2018)

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), mencatat Thales dalam 15 perusahaan produsen persenjataan terbaik di dunia. Thales menempati posisi ke-8 di bawah Airbus Group dengan total penjualan senjata

sebesar 9.0 *billions* USD, yang ditotal dengan penjualan barang manufaktur lainnya sebesar 17.8 *billions* USD. Selain itu, Thales juga menempati posisi ke-8 dalam 100 perusahaan produsen persenjataan dan pelayanan militer di dunia tahun 2017 di bawah Airbus Group dan posisi ke-9 tahun 2016 di bawah Airbus Group menurut SIPRI. Total penjualan yang didapatkan Thales pada 2016 sebesar 8.420 *millions* USD dan 2017 sebesar 9.000 *millions* USD (Fleurant, Kuimova, Tian, Wezeman, & Wezeman, 2018).

IV.2. Kemitraan Strategis Indonesia-Perancis

IV.2.A. *Indonesia-France Defence Dialogue*

Hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Perancis pada dasarnya telah terjalin sejak 1950. Ruang lingkup kerjasama pertahanan yang disepakati antar kedua negara tidak terlalu banyak hanya terbatas pada kerjasama peralatan, logistik dan industri pertahanan. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Perancis tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan, merupakan MoU pertama dalam sejarah kerjasama pertahanan Indonesia Perancis. MoU tersebut ditanda tangani di Paris tanggal 11 Juli 1996 dan terus diperbaharui setiap 5 tahun. MoU mengenai kerjasama peralatan, logistik dan industri pertahanan antara Indonesia-Perancis tersebut dibuat berdasarkan kesadaran mengenai pentingnya melakukan kerjasama pertahanan antar kedua negara. Kerjasama tersebut dianggap penting guna mendukung kemajuan industri pertahanan kedua negara.

Kepentingan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah kesepakatan MoU agar kemudian dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni Hukum Internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum yang berlaku di kedua negara. Hal-hal yang diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut antara lain:

- a. Kerjasama dalam pengoperasian dan pengelolaan peralatan pertahanan;
- b. Kerjasama dalam pengalihan peralatan dan perlengkapan pertahanan serta jasa;
- c. Pertukaran informasi dan data tentang logistik dan industri pertahanan;
- d. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar bersama mengenai logistik dan industri pertahanan;
- e. Kerjasama pelatihan di bidang logistik;
- f. Riset dan pengembangan bersama serta produksi bersama dalam hal – hal yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak;
- g. Kerjasama di bidang ekspor kepada pihak ketiga dan pengadaan peralatan;
- h. Hal- hal lain yang disetujui bersama.

Dalam MoU tersebut kemudian juga disepakati terbentuknya Komite Bersama dalam bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan yang kemudian akan memprakarsai, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan yang berada dalam kerangka kerja MoU (Kementerian Pertahanan RI, 1996). Melalui MoU tersebut, telah dilakukan bekerjasama antar Industri Pertahanan Nasional Indonesia dengan Perancis salah satunya pada produksi **Pindad Anoa Armoured Personnel Carrier (APC)** yang digunakan oleh TNI AD. Pindad Anoa APC adalah kendaraan angkut personel sekaligus kendaraan tempur infantri lapis baja (*Infantry*

Fighting Vehicle (IFV)) yang diproduksi oleh PT. Pindad pada 2006. Pindad Anoa APC dilengkapi mesin milik Renault Perancis yakni mesin MIDR 062045 diesel turbo-charged 6 silinder *inline* dan paket pendingin behr 320Hp, 2500 rpm. Dalam memproduksi Pindad Anoa APC PT. Pindad mencari di pasaran yang sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat. Kemampuan mesin milik Renault cocok digunakan di Pindad Anoa APC. Mesin milik Renault dikatakan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, kemudian Renault mampu meyakinkan PT. Pindad mengenai *after self-service* mesin untuk *sustainability* dari Pindad Anoa APC (Kol. Udara Dedy Laksmono, 2019).

Indonesia-France Defence Dialogue (IFDD) merupakan forum dialog yang bertindak memantau, mengelola, dan meninjau pelaksanaan dari pengaturan teknis yang telah disepakati. IFDD dilaksanakan satu tahun sekali terhitung sejak 2013 yang dihadiri oleh perwakilan dari kedua negara yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut. Tugas dari IFDD antara lain menentukan alokasi tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, mengatur dan melaksanakan kegiatan kerjasama tertentu; jika diperlukan, memberikan rekomendasi; memprakarsai; mengkoordinasi dan meninjau kerjasama, mengatasi masalah yang timbul dari pelaksanaan kerjasama, membentuk kelompok kerja dari isu-isu yang dianggap perlu dan menyampaikan laporan hasil pertemuan kepada Menteri Pertahanan kedua negara (Kementerian Pertahanan RI, 2012). IFDD diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengingat bahwa kerjasama antara Indonesia dengan Perancis tidak hanya penting bagi stabilitas perdamaian, keamanan dan kemakmuran kedua negara melainkan juga sebagai instrumen dalam memelihara stabilitas perdamaian global. Dalam

pelaksanaannya, IFDD dibagi kedalam *sub-committee* diantaranya; *Strategic Affairs Sub-committee*, *Operational/Military Affairs Sub-committee*, *Defence Industry & Procurement Sub-Committee* (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Indonesia-France Defence Dialogue (IFDD) dilaksanakan setiap tahun sejak 2013. Hingga Juli 2019, IFDD telah berhasil dilaksanakan untuk ke tujuh kalinya. Bidang-bidang yang dibahas dalam IFDD terus mengalami perkembangan, sejak 2015 hingga 2019, bahasan yang kemudian disampaikan oleh tiga *sub-committee* yang telah ada adalah:

a. *Strategic Affairs Sub-committee*

Strategic Affairs Sub-committee berfokus pada isu-isu lingkungan strategis yang kemudian harus ditangani bersama. Hal ini mencakup isu terorisme, dimana kemudian kedua negara setuju untuk meningkatkan kerjasama dalam *Counter-Terrorism* didalamnya termasuk pertukaran intelejen dan perlindungan infrastruktur penting kedua negara. Kemudian mengenai *Cyber Terrorism & Cyber Security* dalam hal ini dengan membuat *agreement on Mutual Protection on Classified Information* untuk meningkatkan keamanan dalam pertukaran informasi salah satunya mengenai industri pertahanan. Kemudian keamanan di wilayah Indo-Pasifik juga menjadi prioritas bagi kedua negara, mengingat kawasan Indo-Pasifik penuh dengan ketegangan terbuka termasuk krisis proliferasi nuklir. Indonesia dan Perancis kemudian menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga ketertiban Internasional berdasarkan hukum yang berlaku, kedua pihak berupaya menjaga kebebasan navigasi sesuai dengan hukum UNCLOS. Kedua negara

kemudian memiliki kerjasama dalam bidang keamanan maritime berupa forum dialog yakni *Bilateral Maritime Dialogue* (Kementerian Pertahanan RI, 2019).

b. Operationals/Military Affairs Sub-committee

Operationals/Military Affairs Sub-committee berfokus pada kerjasama operasi militer seperti pada *Peace Keeping Operation (PKO)*, *Joint Excercises* untuk pasukan tentara nasional dan *Military Free-Fall Training* yakni dengan melakukan pertukaran pasukan *Indonesian Army Free-Fall Experts* dengan *Patratroop Experts* Perancis (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Selain itu, pada IFDD ke-4 tahun 2016, Perancis mengundang Korps Marinir TNI AL sebagai *observer* dalam latihan bersama *Croix du Sud* pada 2017 di Nouma, New Caledonia yang diikuti dengan *Humanitarian Assistance and Dissaster Relief (HADR)*. Kemudian Indonesia dan Perancis menyepakati rencana kerjasama seperti keikutsertaan Indonesia dalam *The Frence Nautical Commando Centre (CINC)* dan *RIMaP-NC Paracuting Activities*. Kedua negara berupaya meningkatkan kerjasama antar Angkatan Udara, salah satunya dengan keikutsertaan Indonesia dalam *Paris Air Show, Le Bourget 2017* (Kementerian Pertahanan RI, 2016).

c. Defence Industry & Procurement Sub-committee

Defence Industry & Procurement Sub-committee berfokus pada kerjasama antar industri pertahanan Indonesia dengan Perancis dalam produksi alat utama sistem senjata. Hingga Juli 2019, telah tercatat beberapa kerjasama seperti kerjasama antara PT. Dirgantara Indonesia dengan *Airbus Helicopters* dalam

produksi helikopter sejak 1970an untuk kebutuhan TNI yang kemudian dilakukan ekspor terhadap beberapa item, kemudian produksi *Air Defense System* antara MBDA dengan PT. Pindad dan kerjasama PT. PAL dengan DCNS Perancis dalam produksi kapal selam dan *Frigates* (Kementerian Pertahanan RI, 2016).

Pada tanggal 29 Maret 2019, Presiden Perancis Francois Hollande melakukan kunjungan ke Indonesia dengan didampingi beberapa menteri termasuk menteri pertahanan Perancis Jean-Yves Le Drian. Dalam pertemuan resmi di istana negara, kemudian dilakukan penandatanganan beberapa dokumen kerjasama termasuk diantaranya *Letter of Intent* (LoI) antara Menhan RI dan Menhan Perancis, pada hari yang sama Menhan Perancis melakukan kunjungan ke Kementerian Pertahanan RI. Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam LoI, sejalan dengan hasil-hasil pertemuan *Indonesia-France Defence Dialogue* (IFDD). Kesepakatan-kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kedua negara dalam pelaksanaan maupun perencanaan kerjasama yang akan datang.

Hal - hal yang kemudian dirasa perlu untuk ditindak lanjuti dari LoI yang telah ditandatangani pada 2017 tersebut diantaranya mengenai pendidikan dan pelatihan melalui kursus bersama antar angkatan bersenjata dan membuka peluang dalam pelatihan bersama dengan pasukan Perancis yang berada di Kaledonia Baru. Kemudian peningkatan keamanan maritim dalam hal ini pengembangan dialog mengenai isu-isu *IUU Fishing* dan peningkatan kapabilitas maritime. Berikutnya mengenai kerjasama angkatan laut dan udara melalui operasional kapal permukaan, kapal selam, pesawat tempur, pesawat angkut dan pesawat tanpa awak, serta perlunya membentuk kelompok kerja terkait alutsista laut dan udara. Selanjutnya

yang juga sangat penting untuk ditindak lanjuti adalah mengenai kerjasama dalam *Counter Terrorism* dengan membuka pertukaran informasi intelejen, peningkatan kapabilitas personel dan pelatihan kontra terrorism. Peningkatan kapabilitas pasukan pejaga perdamaian, dalam hal ini Indonesia meminta bantuan Perancis untuk memberikan pelatihan bahasa Perancis untuk meningkatkan kemampuan calon *Peacekeepers* Indonesia yang akan melaksanakan misi di negara-negara berbahasa Perancis.

Selain yang telah disebutkan diatas, kerjasama antar Industri Pertahanan juga dirasa perlu untuk ditingkatkan, dalam hal ini mengenai *Transfer of Technology* (ToT). Kelanjutan pembahasan mengenai *Mutual Protection on Clasified Information* (MPCI) juga akan dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber dan informasi. Lebih lanjut, LoI 2017 tersebut menindaklanjuti pembahasan dalam mempertimbangkan persetujuan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Perancis yang akan dirangkum dalam *Defence Cooperation Agreement* (DCA) (Kementerian Pertahanan RI, 2017). Draf mengenai *Mutual Protection on Clasified Information* (MPCI) terkendala untuk ditandatangani karena Indonesia tidak memiliki Undang-Undang mengenai kerahasiaan negara, kemudian tidak adanya badan yang menangani dokumen rahasia. Sedangkan, untuk *Defence Cooperation Agreement* (DCA) rencananya di *drafting* oleh Perancis, namun sampai hari ini belum sampai kepada perundingan.

IV.2.B. Kerja Sama Industri Pertahanan

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dengan Perancis, perlu diketahui bahwa setiap kerjasama yang terjadi antar industri pertahanan di Indonesia, semua dilakukan atas persetujuan dan pengawasan Kementerian Pertahanan RI, hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Pada Pasal 16 UU No. 3 Tahun 2002 diuraikan tugas dari Menteri Pertahanan sebagai pembantu Presiden dalam Pertahanan Negara, dimana pada ayat 6 disebutkan bahwa Menteri Pertahanan sebagai Pembina dalam industri pertahanan. Dalam menangani kebutuhan kerjasama, Kementerian Pertahanan RI memiliki Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, dimana didalamnya terdapat Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan yang bertindak sebagai pelaksana dalam mengkaji kebutuhan-kebutuhan industri pertahanan dalam negeri. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan memiliki lima sub-direktorat;

Sub-direktorat yang pertama adalah Subdit Perizinan, Subdit Perizinan bertugas untuk melayani perusahaan yang mendaftar menjadi sebuah industri pertahanan, subdit ini kemudian melakukan verifikasi terhadap perusahaan tersebut dan apabila memenuhi kriteria maka kemudian akan ditetapkan sebagai industri pertahanan. Setelah perusahaan tersebut ditetapkan sebagai industri pertahanan, Kementerian Pertahanan kemudian akan melaksanakan pembinaan, untuk menciptakan industri yang kuat, maju, mandiri dan memiliki daya saing. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Sub-Direktorat Industri Pertahanan dimana kemudian setelah dilakukannya pembinaan akan dilakukan pengukuran terhadap *Technology Readiness Level* dan *Manufacturing Readiness Level* untuk melihat posisi dari Industri Pertahanan tersebut, apakah kemampuannya hanya dalam

membuat desain, atau sebagai *integrator* atau mampu memproduksi alutsista dengan teknologi tinggi dan terpercaya, artinya produk yang dihasilkan sudah diakui dan telah berhasil digunakan dalam operasi militer. Setiap bulannya subdit industri pertahanan ini melakukan rapat koordinasi untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi industri pertahanan, dengan dilakukannya rapat koordinasi tersebut, terlihat bahwa Kementerian Pertahanan mengawasi penuh setiap langkah dari industri pertahanan baik BUMN maupun swasta.

Kemudian ada Sub-Direktorat Teknologi Informasi Pertahanan yang mendorong industri pertahanan membuat produk berdasarkan program-program yang dirancang oleh Badan Pelatihan dan Pengembangan Pertahanan dan Badan Pembinaan Potensi Pertahanan. Selanjutnya terdapat Sub-Direktorat Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan *Offset* (IDKLO). Subdit IDKLO merupakan subdit paling penting dalam penyelenggaraan kerjasama Industri Pertahanan, yang dibuat berdasarkan Permenhan 14 tahun 2019. Tugas dan fungsi dari Subdit IDKLO antara lain; merumuskan peraturan – peraturan tentang pelaksanaan kandungan lokal dan offset yang kemudian disusun dan dilaksanakan oleh Industri Pertahanan. Subdit IDKLO kemudian memantau, memonitoring dan mengevaluasi setiap pelaksanaan. Dengan adanya Undang-Undang no. 16 tahun 2012 tentang Industri pertahanan, kemudian Peraturan Pemerintah no. 76 tahun 2014 dan Permenhan no. 30 tahun 2015, terdapat pengaturan bahwa setiap pengadaan alutsista dari luar negeri, wajib adanya kontribusi dari industri pertahanan dalam negeri, apakah sifatnya kandungan lokal, artinya beberapa produk dalam negeri digunakan dalam produk tersebut; kemudian apakah terdapat *Offset* yakni mengenai *Transfer of Technology*

(ToT) yang nilainya minimal 85% dari nilai pengadaan itu sendiri. Perhitungannya dilihat berdasarkan *Value* bukan *Cost*, jadi jika alutsista yang dibeli seharga 1 Miliar, maka value yang harus didapatkan oleh industri pertahanan Indonesia adalah 85% dari 1 Miliar.

Untuk memenuhi 85% tersebut, dapat dilakukan Imbal Dagang, dalam hal ini artinya negara yang mengekspor produknya ke Indonesia harus membeli produk yang dihasilkan industri pertahanan Indonesia atau dapat digantikan dengan membeli hasil bumi maupun produk-produk non-militer. Namun, Imbal Dagang tersebut dapat dikatakan pengecualian. Kementerian Pertahanan mengupayakan untuk tidak terjadinya imbal dagang. Sub-Direktorat terakhir yang juga penting bagi kerjasama industri pertahanan antar negara adalah Subdit Program Kerjasama (Prokerma). Subdit Prokerma menangani administratif dari setiap kegiatan kerjasama, seperti menyusun MoU, menyelenggarakan pertemuan atau dialog industri pertahanan antar negara. Dengan Perancis, Prokerma telah membangun dialog antar Industri Pertahanan Indonesia dengan Perancis melalui *Indonesia-France Defence Dialogue on Defence Industry Sub-Committee*. Melalui dialog tersebut, perwakilan dari perusahaan-perusahaan Industri Pertahanan kedua negara dipertemukan didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan kedua negara, untuk kemudian membahas kerjasama-kerjasama yang sudah berjalan maupun melakukan penawaran terhadap alutsista yang sekiranya dibutuhkan oleh kedua negara (Kol. Udara Dedy Laksmono, 2019).

Metode dalam kerjasama industri pertahanan ini kemudian digunakan dalam upaya pemenuhan kekuatan pokok minimum pertahanan/ *Minimum*

Essential Force. Minimum Essential Force (MEF) merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, yang dicatat pada Peraturan Menteri Pertahanan No. 2 tahun 2010. Penyusunan mengenai langkah-langkah dalam memenuhi kekuatan pokok minimum pertahanan ini sebelumnya telah dijabarkan dalam *Strategic Defence Review* (SDR) pada tahun 2009. SDR dijadikan pedoman dalam pembentukan kebijakan yang lebih komprehensif. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010, MEF dibagi dalam 3 (tiga) tahap; tahap pertama adalah tahun 2010-2014 dimana aspeknya adalah pada pemenuhan alutsista, kemudian tahap kedua tahun 2015-2019 yang aspeknya meliputi pemenuhan alutsista, pengembangan organisasi serta pemeliharaan dan perawatan dan tahap terakhir tahun 2020-2024 dimana aspek pendukung pemenuhannya adalah pada kemajuan dan kemandirian industri pertahanan, profesionalisme dan kesejahteraan. (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

Airbus Helicopters

Airbus Helicopters dibentuk pada 1992 sebelumnya disebut Eurocopter. Perusahaan ini dikenal sebagai industri penghasil helikopter dengan kemampuan canggih untuk kebutuhan sipil hingga militer (*International Trade Administration Department of Commerce USA*, 2016). Hingga kini, helikopter produksi Airbus telah digunakan di lebih dari 150 negara di dunia (AIRBUS, n.d.). Produk dari Airbus Helicopter yang kemudian dikerjasamakan dengan industri pertahanan Indonesia antara lain;

Gambar IV.1
Helikopter AS550 C3e Fennec



Sumber : (KKIP RI, 2018)

AS550 C3e *Fennec* merupakan *Light Helicopter* milik Airbus Helicopters yang dimodifikasi oleh PT. Dirgantara Indonesia untuk mendukung kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Modifikasi terhadap *Fennec* dilakukan sesuai perjanjian kerjasama dengan Airbus Helicopter. *Fennec* adalah bagian dari keluarga *Ecureuil* yang didesain oleh Airbus Helicopter. *Fennec* dengan berat 2 ton adalah solusi bagi persyaratan helikopter pemandu bersenjata. Sistem rotor memungkinkan pengoperasian yang lembut dan senyap saat terbang dengan kecepatan tinggi. *Fennec* sangat mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaan, bahkan dalam kondisi ekstrim dan keras sekalipun, sehingga mampu memberikan keamanan dan kinerja maksimum. Dengan karakteristik *small-footprint*, *low detectability* dan dilengkapi dengan sistem persenjataan, *Fennec* sangat efektif

untuk semua jenis operasi militer karena konstruksinya yang kokoh dan pilihan senjata yang cukup banyak, diantaranya 20mm *cannon pod*, 7mm *machine gun pod*, 62mm *side machine gun*, 70mm *rockets* dan *A to G guided missiles* (KKIP RI, 2018). Selain varian AS550-C3, PTDI juga mengembangkan varian lainnya yang kemudian digunakan oleh TNI AD yakni AS555-AP *Fennec* dan AS350-B3 *Fennec*. Pengadaan helikopter *Fennec* untuk dimodifikasi oleh PTDI dilaksanakan sejak 2012 hingga 2017, sebanyak 12 *unit* (SIPRI *Arms Transfers Database*, 2020).

Selain *Light Helicopter Fennec*, Airbus Helicopters sejak 1970 telah berkerjasama dengan PTDI dalam memproduksi lebih dari 190 helikopter, juga melakukan kerjasama dalam memodifikasi helikopter EC225 *Super Puma* dan EC725 *Super Cougar Helicopter* yang dimodifikasi dengan varian *Airframe and Tail Boom* tidak hanya untuk melengkapi kekuatan pertahanan Indonesia melainkan juga untuk diekspor ke luar negeri.

Gambar IV.2
Helikopter H225/H225M



Sumber : (Indo Militer, 2017)

EC225 *Super Puma* dan EC725 *Super Cougar* kini lebih dikenal dengan H225 dan H225M *Caracal*. Helikopter H225M merupakan helikopter tempur multi-fungsi, Sedangkan H225 merupakan helikopter angkut VIP/VVIP. Pergantian nama terhadap helikopter dilakukan karena perubahan nama perusahaan Eurocopter menjadi Airbus Helicopters. Helikopter ini menggunakan mesin ganda yaitu 2x *Turbomeca Makila 1A4 tuboshfts* dengan kecepatan maksimum 324 km/jam dan dapat mengudara selama 6,5 jam. Kontrak pembelian terhadap helikopter ini dilakukan pada 2012 dimana pengadaan untuk kebutuhan TNI AU sebagai helikopter *Combat Search and Rescue*, dilakukan selama 2016 sampai 2017 sebanyak 6 unit (SIPRI Arms Transfers Database, 2020).

Gambar IV.3
Helikopter AS565 MBe Panther



Sumber : (Indo Militer, 2015)

Kemudian AS565S *Panther* atau kemudian dikenal AS565 Mbe *Panther*, merupakan kerjasama antara Airbus Helicopters dengan PTDI untuk mengadaan keperluan TNI AL. Kontrak ditandatangani pada 2014 yang kemudian pengadaan dilakukan mulai 2016-2019 sebanyak 11 unit (SIPRI *Arms Transfers Database*, 2020). PTDI mendapatkan kesempatan untuk memodifikasi dan melengkapi peralatan sesuai dengan kebutuhan TNI AL terutama terkait Anti-Submarine Warfare yang mencakup *dipping sonar* dan sistem peluncuran torpedo yang memungkinkan TNI AL untuk melaksanakan misi di lapangan. AS565 MBe Panther telah dikembangkan menggunakan proses *state-of-the-art* dan menjadi varian Panther yang disempurnakan. Sebagai salah satu helikopter ringan atau menengah dengan platform peperangan anti-kapal selam, helikopter ini dilengkapi dengan dua mesin Safran *Arriel 2N*. Helikopter yang mampu beroperasi pada iklim

panas ini mempunyai kecepatan tertinggi pada 165 kt dan jangkauan hingga 780 kilometer (Rohman, 2016). Yang terakhir adalah helikopter *Tactical Transport AS332C1e Super Puma* yang dipesan pada 2014 sebanyak 5 unit untuk PTDI yang rencananya akan dimodifikasi untuk kebutuhan TNI AU (SIPRI Arms Transfers Database, 2020).

Nexter Group

Nexter Group merupakan perusahaan yang memproduksi kendaraan artileri dan sistem senjata, yang dimiliki oleh pemerintah Perancis. Sebelum dikenal sebagai Nexter Group, industri pertahanan milik pemerintah Perancis ini dikenal sebagai *Groupment des Industries de l'Armee de Terre* (GIAT). GIAT didirikan pada 1973 dengan penggabungan asset industri dari arahan teknis Kementerian Pertahanan Perancis. Perusahaan ini kemudian dinasionalisasi pada 1991. GIAT kemudian berganti nama menjadi Nexter Group pada 22 September 2006. Perusahaan ini menyediakan sistem artileri CAESAR kepada angkatan darat Perancis, tank tempur le Leclerc dan kendaraan tempur VBCI (International Trade Administration Department of Commerce USA, 2016).

Kemampuan Nexter group dalam memproduksi sistem persenjataan sudah tidak diragukan lagi. Bagi Indonesia, Nexter merupakan mitra yang mapan, beberapa produk telah digunakan sebagai pendukung kekuatan pertahanan Indonesia. Tidak hanya membeli produk dari Nexter, pemerintah Indonesia memanfaatkan kesempatan melalui hubungan kedekatan ini untuk kemudian dilakukan *Transfer of Technology*. ToT dilakukan dengan *partner* lokal yaitu PT. Pindad. Salah satu produk Nexter yang telah berhasil dilakukan ToT dengan PT. Pindad adalah *Meriam Caesar 155MM*.

Gambar IV.4
Meriam CAESAR 155mm GS Howitzer



Sumber : (Ziyadi, 2017)

Pegadaan *Meriam Caesar* 155mm pada dasarnya telah dilakukan sejak 2012, dimana pada 2012 Kementerian Pertahanan memesan sebanyak 37 unit untuk kebutuhan TNI AD. Melalui kesepakatan *Transfer of Technology* antara Nexter dengan PT. Pindad dan PT. LEN, pada 2017 kembali dilakukan pengadaan sebanyak 18 Unit. Melalui pembangunan Meriam Caesar 155mm GS Howitzer, PT. Pindad mendapat *offset* berupa kandungan lokal, pembuatan kendaraan pendukung kemudian *ToT Barel Meriam* dan cara produksi meriam itu sendiri. Kemudian PT. Pindad dapat mengintegrasikan, menggunakan dan memelihara *Fire Control System (FCS) Finart* dan *ToT* bagaimana mendesain, memproduksi, mengintegrasikan serta melakukan pengujian terhadap kendaraan pendukung. Sedangkan PT. LEN mendapatkan manfaat berupa kandungan lokal berupa mengintegrasikan dan memelihara FCS (Kol. Udara Dedy Laksmono, 2019).

Gambar IV.5
Komodo 4X4 Recon



Sumber : (PINDAD, 2019)

Selain itu, Nexter juga melakukan kerjasama dengan PT. Pindad dalam memproduksi Komodo 4X4 Recon dengan *Mobile Command and Communication*. Varian kendaraan taktis Komodo yang di desain untuk misi pengintaian. Kendaraan ini dirancang untuk bergerak cepat dan tepat dalam setiap misinya. Dilengkapi dengan mesin *diesel* 215 HP dengan *Turbo Charger Intercooler*, kendaraan ini mampu mencapai top speed 80 km/h di jalan raya, dengan daya jelajah sejauh 450 kilometer. Kendaraan ini cukup untuk menampung 4 orang personel di dalamnya, yang dapat terhubung dengan pasukan lain lewat alat komunikasi radio VHF dan HF, serta *Intercom* yang telah terpasang didalamnya. Kendaraan ini juga memiliki GPS dan *Thermal Vision* untuk membantu pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan dalam keadaan gelap di malam hari.

MBDA Missile Systems

MBDA *Missile System* merupakan industri pertahanan Perancis yang bergerak dalam memproduksi rudal. Perusahaan ini didirikan pada Desember 2001 melalui penggabungan Rudal *Aerospatiale*-Matra dari EADS atau Airbus Group, *Finmeccanica* dan Matra BAe *Dynamics*. MBDA telah menjadi produsen senjata berpemandu kebanggaan Eropa (International Trade Administration Department of Commerce USA, 2016). MBDA adalah satu-satunya industri pertahanan di wilayah Eropa yang mampu merancang dan memproduksi rudal dan sistem rudal untuk memenuhi seluruh jajaran kebutuhan masa kini dan masa depan dari ketiga angkatan bersenjata (MBDA, 2019).

Gambar IV.6
Komodo 4X4 Missile Launcher



Sumber : (Pindad, 2019)

Salah satu bentuk kehadiran MBDA *Missile System* di Indonesia adalah melalui kolaborasinya dengan PT. Pindad dalam menciptakan varian Komodo 4X4 Missile Launcher, dimana varian Komodo 4X4 ini memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal Mistral ciptaan MBDA *Missile System*, yang terpasang pada bagian belakang kendaraan. Varian ini memiliki kapasitas personel 4 orang. Berbeda dengan varian lainnya, varian ini menggunakan transmisi manual untuk perpindahan percepatan pada mesinnya. Selain itu, Komodo *Missile Launcher* ini dilengkapi dengan *intercom* set sebagai alat komunikasi personel yang berada didalamnya. Varian ini digunakan oleh TNI-AD untuk keperluan pertahanan udara (Pindad, 2019). Pada 2014 TNI AD memesan sebanyak 56 unit untuk kebutuhan arhanud pada 2014 yang pengadaanya dilaksanakan mulai 2015. Dalam memproduksi Komodo varian ini, MBDA menyediakan 9 MPCV (*Multi Purpose Combat Vehicle*), 9 MCP (*Mistral Coordination Post/Radar*), 56 ATLAS (*launching Systems*) untuk kemudian dilakukan ToT dan 136 rudal untuk TNI AD. Komodo Varian ini kemudian telah dilakukan uji coba oleh TNI AD pada 2016 (SIPRI *Arms Transfers Database*, 2020).

Kemudian MBDA juga bekerjasama dengan PT. Dirgantara Indonesia dalam membangun *Air Defence and Anti-Ship Weapons Systems based on MBDA Missiles* dengan memasukan rudal EXOCET dan rudal MISTRAL ke dalam kapal Dipenegoro-class korvet & fregat *Sigma Class* atau Ahmad Yani-class fregat sebanyak 30 unit. Kontrak ditanda tangani pada 2014, dan pengerjaannya masih berjalan hingga 2019. Yang terakhir adalah pengadaan rudal MICA yang digunakan sebagai *Surface-to-Air Missile* yang akan dipasang pada kapal fregat *Sigma Class*, lebih tepatnya pada Martadinata-class fregat sebanyak 40 *unit* pada tahun 2016 (SIPRI *Arms Transfers Database*, 2020).

Renault Truck Defense

Renault adalah perusahaan produsen kendaraan milik Perancis yang didirikan pada tahun 1899. Kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Renault sudah terjalin cukup lama. Kerjasama dimulai pada 2006 dimana PT. Pindad menggunakan mesin Renault MIDR 062045 diesel Turbo-charged 6 silinder inline, paket pendingin VAB 320Hp, 2500Rpm dalam memproduksi Panser Anoa 6X6 atau kendaraan angkut personel lapis baja. Pembelian terhadap mesin tersebut masih terus berlangsung dimana pada tahun 2013-2015 masih terus dilakukan pengiriman terhadap mesin MIDR untuk produksi Anoa 6X6 sejumlah 134 unit. Pada tahun 2016 PT. Pindad kembali melakukan pembelian mesin diesel MIDR untuk diaplikasikan dalam Ranpur 6X6 Pindad Badak sebanyak 50 unit, berdasarkan kebutuhan TNI AD.

Pada tahun 2011 hingga 2015, Pemerintah Indonesia melakukan pemesanan Renault *Light Scout Sherpa* sebanyak 100 unit yang kemudian 12 Unit diantaranya dimodifikasi dan dilisensi sebagai kendaraan pengintai “Elang” 4X4 oleh PT. Pindad.

Gambar IV.7
Pindad Elang 4X4



Sumber : (Indo Militer, 2015)

Elang *Recon Vehicle* 4X4 merupakan kendaraan intai yang menggunakan desain bodi asli Renault Sherpa yang dirakit kembali oleh PT. Pindad. Kendaraan ini kemuian dioperasikan Yonif Mekanis 201 dan 202. Pada 2017, Indonesia kembali melakukan pembelian terhadap Renault *Sherpa Light Scout Armored* sebanyak 6 *unit* untuk digunakan kontingen indobatt pada misi *United Nations Interim Force* di Lebanon (Raditya, 2017).

Thales

Thales adalah perusahaan multinational milik Perancis yang merancang dan membangun sistem elektrik yang mencakup bidang kedirgantaraan, pertahanan, transportasi dan keamanan. Sebelumnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertahanan Perancis ini bernama *Thomson-CSF* yang dibangun sejak 1879. Pada bulan Desember tahun 2000, perusahaan tersebut merubah nama menjadi Thales karena dirasa nama *Thomson-CSF* sudah tidak relevan dengan produk-produk yang semakin berkembang (Robb, 2000). Thales merupakan mitra lama dan terpercaya bagi pasukan militer dan keamanan di seluruh dunia. Thales memiliki empat bidang keahlian diantaranya mengenai pengawasan sistem deteksi dan intelejen, komunikasi sistem komando dan kontrol, sistem perlindungan dan sistem misi juga sistem tempur dan layanan support terhadap misi (International Trade Administration Department of Commerce USA, 2016).

Dengan Indonesia, Thales memiliki posisi terdepan dalam segmen pertahanan angkatan laut, Thales telah menjadi pemasok sistem pertempuran yang ditunjuk untuk semua kapal perang yang beroperasi dengan Angkatan Laut Indonesia selama hampir 40 tahun. Thales memasok dan mengintegrasikan elektronik tempur angkatan laut untuk kapal korvet kelas Sigma serta pemasok dan integrator sistem misi pusat untuk program *Frigate* PKR Indonesia saat ini. Dalam pengawasan dan *patrol maritime*, Thales dipilih oleh angkatan udara dan angkatan laut Indonesia untuk memasok sistem *Amascos* yang terintegrasi untuk pesawat CN-235 dan NC-212. Thales adalah pemasok mapan untuk angkatan darat Indonesia dalam sistem komint dan kamera termal. Pada November 2013, Thales

menandatangani kontrak untuk pengiriman pemasangan paket sistem misi penuh untuk dua kapal kelas PKR yang sedang dibangun oleh galangan kapal *Dutch Shipyard Damen Schelde Naval Shipbuilding* untuk angkatan laut Indonesia (Thales Group, 2019). Thales telah lama ditunjuk sebagai pemasok radar pengintai untuk Angkatan Udara Indonesia. Saat ini, Indonesia menggunakan Radar *Master-T* buatan Thales sebagai radar *Ground Control Interception* TNI AU. Thales juga merupakan mitra bagi industri pertahanan Indonesia yang utama adalah dengan PT. LEN dan PT. Pindad. Kerjasama dalam pengembangan radar Angkatan Udara Indonesia bersama dengan PT. LEN. Melalui MoU antara PT. LEN dengan Thales pada bulan April 2019 lalu, Thales membantu PT. LEN dalam alih teknologi, guna mengembangkan keahlian lokal dalam manajemen dan pemeliharaan radar (PR *Newswire*, 2019).

Pada 2014 telah ditandatangani kontrak pembelian *Air Search Radar Ground Master-200* sebanyak 5 *unit*. Pengadaan terhadap radar ini dilakukan mulai dari tahun 2016 – 2017. Radar *Ground Master-200* ini akan menjadi bagian dari *Controlmaster-200 Command System* yang terpasang pada *Forceshield SAM System* dari UK. Thales Perancis akan melakukan *Transfer of Knowledge* dengan PT. LEN dalam pemeliharaan radar tersebut.

Untuk lebih jelas mengetahui apa saja *Offset* yang didapatkan Indonesia melalui kerjasama yang telah disebutkan di atas, berikut tabel penerimaan *Offset* berdasarkan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis;

Tabel IV.2
Offset yang Diterima Industri Pertahanan Indonesia

| No. | Perusahaan Asal | Jenis Alutsista | Offset | Keterangan |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1. | Airbus Helicopters Perancis | Helikopter AS550/AS555 <i>Fennec</i> | Pemberian Lisensi dengan dilakukan Pemasangan beberapa komponen helikopter seperti Pod Senapan mesin FN HMP250, Dudukan canon dan peluncur roket FFAR Jenis FZ-219 (AIRSPACE REVIEW, 2018). | Dilakukan di PT. DI, Bandung |
| 2. | Airbus Helicopters Perancis | Helikopter AS565 MBe Panther | Pemberian Lisensi dengan dilakukan pemasangan beberapa komponen helikopter diantaranya peranti anti Submarine Warfare termasuk sonar dan sistem peluncur misil (Kompas, 2016) | Dilakukan di PT.DI, Bandung |
| 3. | Airbus Helicopters Perancis | Helikopter H225/H225M | <i>Co-Production & Co-Development</i> , pemasangan <i>local content</i> berupa <i>tailboom</i> atau ekor helikopter dan <i>fuselage</i> atau badan helikopter (Kompas, 2017) | Dilakukan di Airbus Helicopters, Perancis |
| 4. | Nexter Perancis | Meriam CAESAR 155mm GS Howitzer | Offset berupa kandungan lokal, pembuatan kendaraan pendukung kemudian ToT Barel Meriam dan cara produksi meriam itu sendiri. Kemudian PT. Pindad dapat mengintegrasikan, menggunakan dan memelihara <i>Fire Control System (FCS) Finart</i> dan ToT bagaimana mendesain, memproduksi, mengintegrasikan serta melakukan pengetesan terhadap kendaraan pendukung. Sedangkan PT. LEN mendapatkan manfaat berupa kandungan lokal berupa mengintegrasikan dan memelihara FCS. | Dilakukan di PT. Pindad, Bandung |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 5. | PT. Pindad | Komodo 4X4 Recon | Produksi bersama dengan pengadaan beberapa komponen dari Nexter Perancis, seperti perangkat komunikasi dan komando pengintai | Dilakukan di PT. Pindad, Bandung |
| 6. | PT. Pindad | Komodo 4X4 Missile Launcher | Produksi bersama dengan MBDA Perancis, dimana MBDA menyediakan 9 MPCV (<i>Multi Purpose Combat Vehicle</i>), 9 MCP (<i>Mistral Coordination Post/Radar</i>), 56 ATLAS (<i>launching Systems</i>). | Dilakukan di PT. Pindad, Bandung |
| 7. | PT. Pindad | Panser Anoa | Dilakukan produksi bersama dengan Renault Truck Defense Perancis, Renault menyediakan beberapa komponen seperti mesin MIDR 062045 <i>diesel Turbo-charged</i> 6 silinder <i>inline</i> , paket pendingin VAB 320Hp, 2500Rpm | Dilakukan di PT. Pindad, Bandung |
| 8. | MBDA Perancis | Rudal Exocet dan Rudal Mistral | <i>Co-Development</i> dalam pemeliharaan dan perawatan serta pemasangan pada alutsista terkait | Dilakukan di PT. Pindad, Bandung |
| 9. | Renault Truck Defense Perancis | Renault Sherpa | Pemberian Lisensi dengan dilakukan perubahan pada bagian – bagian tertentu dan dimodifikasi menjadi Panser Elang <i>Recon Vehicle 4X4</i> | Dilakukan di PT. Pindad, Bandung |
| 10. | Thales Perancis | Radar Ground Master – 200 dan Radar Master-T | Co-Development berupa pemeliharaan dan perawatan radar | PT. LEN, Bandung |

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

IV.3. Pemenuhan MEF Tiga Matra TNI

Industri pertahanan merupakan elemen pendukung utama dalam memenuhi MEF Indonesia, yang merupakan bentuk pelaksanaan *Revolution in*

Military Affairs (RMA). Untuk itu, melalui MEF industri pertahanan Indonesia didorong untuk lebih berkembang, maju, berdaya saing dan mandiri. Melalui MEF, pemerintah mengharapkan terjadinya Transformasi Pertahanan dimana terwujudnya Negara *Autarky* atau negara dengan kemandirian pertahanan. Pembangunan MEF tidak semata – mata diarahkan pada pengadaan alutsista hingga mencapai postur ideal pertahanan, melainkan untuk memenuhi tujuan lainnya yang meliputi peningkatan kemampuan industri pertahanan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kebijakan MEF mengacu pada Undang-Undang Industri Pertahanan dimana setiap pengadaan alutsista untuk kekuatan militer Indonesia, harus melibatkan Industri Pertahanan dalam negeri. Sadar akan kurangnya sumber daya dan teknologi, pemerintah Indonesia tidak semata-mata menolak kontribusi dari luar negeri dalam pengadaan alutsista melainkan mengharuskan setidaknya terdapat 85% kandungan lokal maupun *offset* dari pengadaan luar negeri.

Kerjasama dengan luar negeri dalam pengadaan alutsista untuk pemenuhan MEF menjadi hal penting bagi Indonesia, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia mencapai kemandirian pertahanan. Perancis, merupakan salah satu negara yang mendukung cita-cita tersebut. Secara lantang disetiap pertemuan kedua negara, Perancis menyatakan kesediaannya untuk membantu Industri Pertahanan Indonesia untuk berkembang. Perancis menunjukkan keseriusannya melalui penawaran-penawaran kerjasama industri pertahanan, untuk pengadaan alutisista, dalam rangka memenuhi MEF. Pada bab ini akan dikaji, apakah kerjasama industri pertahanan dengan Perancis efektif dalam memenuhi MEF. Pengukuran mengenai

efektif atau tidaknya kerjasama tersebut akan dilakukan berdasarkan Konsep Menurut Martani dan Lubis (1987), di mana dikatakan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai (Martani & Lubis, 1987). Indikator yang tertera dalam teori efektivitas menurut Martani dan Lubis (1987), di mana dikatakan bahwa untuk mengukur efektivitas sebuah kinerja dalam mencapai tujuan atau program dan kegiatan, dibutuhkan indikator sebagai acuan dalam menilai hal tersebut. Martani dan Lubis dalam bukunya “Teori Organisasi” menjelaskan kriteria atau ukuran dari efektivitas, melalui tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*) yakni mengukur efektivitas melalui input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik, maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan Proses (*Process Approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses *internal* atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*) di mana fokus perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana (Martani & Lubis, 1987).

Pengukuran mengenai efektivitas kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis dalam memenuhi MEF, akan dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama akan dilakukan pengukuran berdasarkan kebutuhan TNI AD, yang kedua berdasarkan kebutuhan TNI AL dan yang ketiga berdasarkan kebutuhan TNI AU. Setelah berhasil melakukan pengukuran pada tiga matra tersebut akan kemudian akan dilihat hasil secara keseluruhan berdasarkan data yang ada.

IV.3.A. TNI AD

Melalui apa yang telah dibahas sebelumnya mengenai bentuk – bentuk kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis, terlihat cukup banyak alutsista yang mampu mendukung pemenuhan kebutuhan TNI AD pada pembangunan MEF Tahap II. Untuk melihat lebih jelas seberapa besar pengaruh kerjasama antara Industri Pertahanan Indonesia-Perancis dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI AD dalam rangka pemenuhan MEF tahap II, maka perlu dilakukan pengukuran antara jumlah kebutuhan dan jumlah pengadaan yang dihasilkan melalui kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis.

Tabel IV.3
Kebutuhan Alutsista TNI AD Pada MEF Tahap II

| No. | Unit | Jenis |
|-----|----------|---|
| 1. | 393 Unit | Kendaraan Darat (Ranpur, Rantis, Panser) |
| 2. | 18 Unit | Helikopter/Pesawat (Angkut Sedang, Angkut Berat, Serbu, <i>Drone</i> PTTA/UAV) |
| 3. | 202 Unit | Rudal |
| 4. | 16 Paket | Peralatan & Logistik Lainnya |

Sumber : (Kementerian Pertahanan RI, 2015)

Tabel diatas merupakan rincian kebutuhan alutsista TNI AD yang akan dipenuhi dalam pembangunan MEF tahap II. Terdapat kebutuhan pengadaan kendaraan darat sebanyak 393 *Unit* diantaranya meliputi 91 *Unit* kendaraan tempur, 114 *Unit* Rantis Komodo, 130 *Unit* Panser Infanteri, 28 *Unit* Panser Kavaleri. Kemudian kebutuhan pengadaan 16 *Unit* Helikopter meliputi 8 *Unit* Helikopter Serbu, 5 *Unit* Helikopter Angkut Sedang, 3 *Unit* Helikopter Angkut Berat. Selanjutnya terdapat 202 *Unit* kebutuhan pengadaan rudal diantaranya 50 *Unit* Rudal Mistral dan 152 *Unit* Rudal Startreak. Kebutuhan pengadaan peralatan lainnya meliputi missile MLRS *Avibrasi/Astros* II 1 paket, Senjata Berat Armed 2 paket, Senjata Ringan Infantri 5 paket, Alat penyeberangan *Amphibious Ponton* Set 2 set, Rudal 1 paket, PTTA/UAV 4 paket, Alat Berat Zeni 2 paket, LCU 2 unit (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Tabel IV.4.
Kebutuhan Alutsista TNI AD Pada Pembangunan MEF Tahap II Yang Berhasil
Dipenuhi Melalui Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis

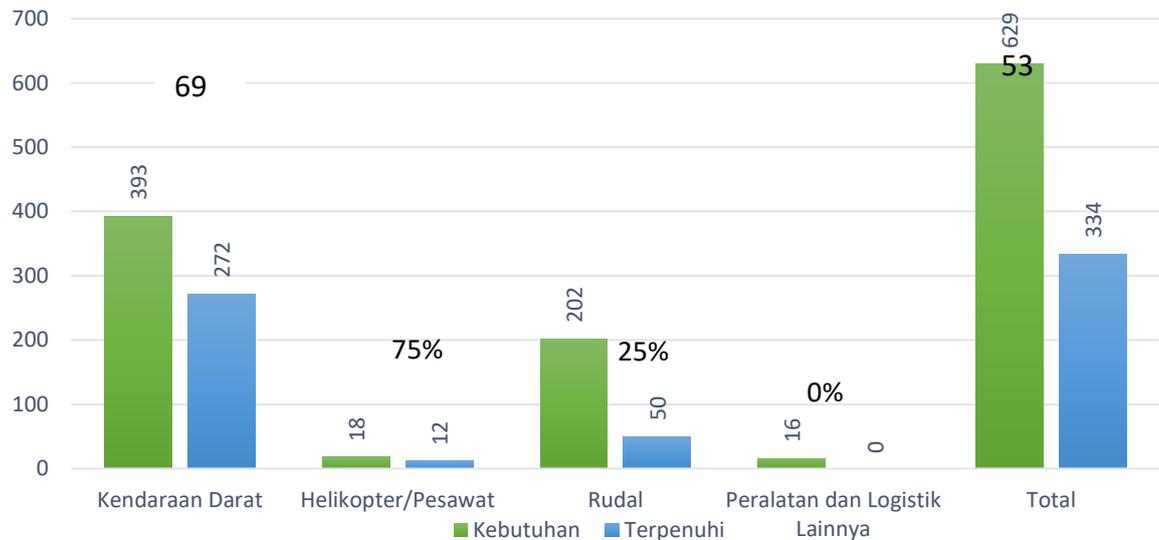
| No. | Jenis Alutsista | Jumlah Unit Yang Dibutuhkan | Jumlah Unit Yang Terpenuhi | Keterangan |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1. | Kendaraan Darat (Ranpur, Rantis, Panser) | 393 <i>Unit</i> | 272 <i>Unit</i> | Rantis Komodo produksi PT. Pindad dengan varian pelontar rudal Mistral MBDA Perancis dan varian <i>Mobile Command and Communication</i> Nexter Perancis. Kemudian Panser Anoa produksi PT. Pindad yang menggunakan mesin Renault |
| 2. | Helikopter (Helikopter angkut sedang, Helikopter angkut berat, Helikopter Serbu) | 18 <i>Unit</i> | 12 <i>Unit</i> | Helikopter Serbu Ringan Fennec AC-550C3, AS-555AP, AS350B3 Produksi Airbus Perancis yang dimodifikasi oleh PT.DI |

| | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 3. | Rudal | 202 <i>Unit</i> | 50 <i>Unit</i> | Rudal Mistral MBDA |
| 4. | Peralatan dan Logistik Lainnya | 16 Paket | - | - |
| 5. | Total Kebutuhan Alutsista dan Peralatan Lainnya | 629 <i>Unit</i> | 334 <i>Unit</i> | - |

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Total keseluruhan dari kebutuhan logistik, peralatan dan alutsista yang dibutuhkan TNI AD untuk dipenuhi pada pembangunan MEF Tahap II adalah sejumlah 629 *Unit* yang terdiri dari 393 *Unit* Kendaraan Darat, 18 *Unit* Helikopter, 202 *Unit* Rudal dan 16 Paket Peralatan lainnya. Kolaborasi industri pertahanan Perancis dan Indonesia berhasil memenuhi 272 *Unit* yang diantaranya adalah 114 *Unit* Rantis Komodo dengan 4 varian, dimana 2 varian diantaranya merupakan hasil kolaborasi dengan MBDA dan Nexter Perancis, kemudian 158 Panser Anoa sebagai Panser andalan TNI yang menggunakan mesin dari Renault Perancis. Selain itu, kebutuhan 18 *Unit* Helikopter yang terdiri dari helikopter angkut sedang, angkut berat dan helikopter serbu, kolaborasi Industri Pertahanan Perancis Airbus Helicopters dan PT.DI berhasil memberikan 12 *unit* helikopter *Fennec* yang merupakan helikopter serbu ringan (Indo Militer, 2017). Yang Terakhir, Kebutuhan Rudal Mistral sebanyak 50 *Unit* dari MBDA Perancis berhasil dipenuhi (SIPRI *Arms Transfers Database*, 2020).

Grafik IV.1.
Pemenuhan MEF Tahap II TNI AD Berdasarkan Kejasama Industri Pertahanan Indonesia - Perancis



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Jika dibuat dalam bentuk grafik dari pengadaan alutsista tersebut, maka terlihat seberapa besar kontribusi dari kerjasama inhan Indonesia-Perancis dalam memenuhi pembangunan MEF Tahap II TNI AD. Dalam memenuhi pengadaan kendaraan darat, kerjasama inhan Indonesia-Perancis berhasil memberikan kontribusi sebesar 69%. Sedangkan untuk pengadaan helikopter dan Pesawat, inhan kedua negara berhasil memenuhi 75% dari kebutuhan mengingat kolaborasi antara Airbus Helicopters dengan PT. DI sudah terjalin cukup lama degan produk yang dihasilkan juga sudah teruji kualitasnya. Kemudian untuk pengadaan rudal, kolaborasi inhan kedua negara setidaknya memenuhi 25% kebutuhan, hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan pengadaan rudal startreak dari Amerika

Serikat. Dalam rencana pengadaan peralatan dan logistik lainnya untuk TNI AD, belum ada yang dipenuhi melalui kerjasama indhan Indonesia-Perancis. Total dari keseluruhan pengadaan alutsista yang dibutuhkan TNI AD, 53% dapat terpenuhi melalui kerjasama antar indhan Indonesia-Perancis. Melihat angka tersebut, kolaborasi industri pertahanan Indonesia-Perancis dapat dikatakan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi TNI AD.

IV.3.B. TNI AL

Melihat beberapa kerjasama yang telah dibahas sebelumnya, kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis terlihat tidak cukup andil dalam bidang pertahanan laut. Perancis sudah beberapa kali melakukan penawaran alutsista untuk pertahanan laut Indonesia melalui forum IFDD, namun penawaran tersebut belum mencapai kesepakatan dengan industri pertahanan lokal. Untuk melihat seberapa besar kontribusi Perancis dalam pertahanan laut Indonesia berikut tabel mengenai kebutuhan alutsista TNI AL pada pembangunan MEF Tahap II yang berhasil dipenuhi melalui kolaborasi industri pertahanan Indonesia Perancis;

Tabel IV.4.
Kebutuhan Alutsista TNI AL Pada Pembangunan MEF Tahap II Yang Berhasil
Dipenuhi Melalui Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis

| No. | Jenis Alutsista | Jumlah Unit Yang Dibutuhkan | Jumlah Unit Yang Terpenuhi | Keterangan |
|-----|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1. | Kapal | 21 Unit | - | - |
| 2. | Rudal & Meriam | 66 Unit | 36 Unit | Rudal MICA VLS From MBDA Perancis Rudal EXOCET Upgrade dari Block 2 menjadi Block 3 |
| 3. | Pesawat & Helikopter | 2 Unit | - | - |

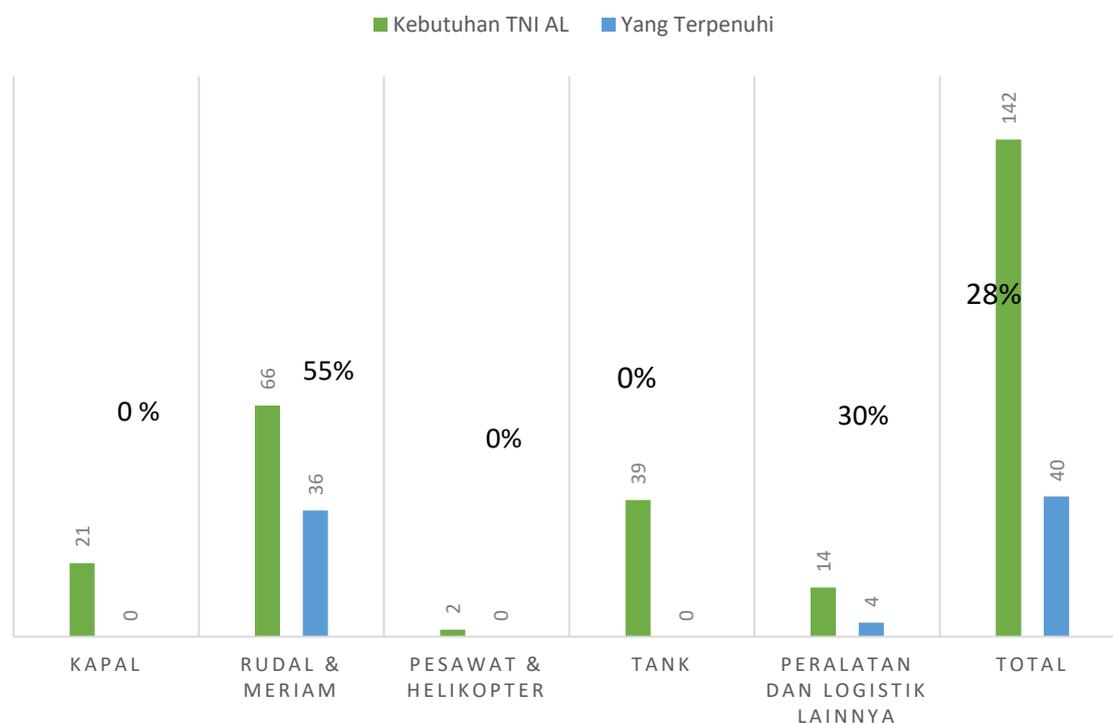
| | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|---------|--|
| 4. | Tank | 39 <i>Unit</i> | - | - |
| 5. | Peralatan dan Logistik Lainnya | 14 Paket | 4 Paket | 4 Paket <i>Full Combat Mission</i> untuk Helikopter Anti Kapal Selam from Airbus AS565 MBe Panther |
| 6. | Total | 142 Unit | 40 Unit | - |

Sumber : Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Pembangunan MEF Tahap II TNI AL diantaranya meliputi pengadaan Kapal *Offshore Patrol Vessel* 4 Unit, Kapal Angkut *Tank* 6 Unit, KCR-60 3 Unit, Platform KCR-60 1 Unit, Platform KCR-60 1 Paket, Kapal *Fregate* 4 Unit, FFBNW Kapal PKR-10514 2 *Shipset*, FCS SAM Pengganti *Seawolf* MRLF 3 *Shipset*, Upgrade FCS SSM *Exocet* MM 40 *Block* 2 menjadi *Block* 3 30 Unit, FCS kapal MLRF 3 *Shipset*, Kapal Selam kelas Kilo 2 Unit, Kapal *Mine Counter Measure* 2 Unit, Meriam Kal 40 mm 4 Unit, Meriam Kal 30mm 8 Unit, Pesawat Patroli Meriam 1 Unit, Helikopter Angkut 1 Unit, *Full Combat Mission* Helikopter AKS AS565 MBe *Panther* 4 Paket, *Tank/ Ranpur* Angkut Personel 12 Unit, *Tank* Amfibi BMP-3F 27 Unit, MKB (kal 76 mm Otomelara, kal 105 mm *Howitzer*, kal 40 mm L/70 dan L/60, kal 57 mm Bofors, serta kal 30 mm 7/30 dan 6/30) sebanyak 52.700 butir, Torpedo Kapal Selam 1 Paket, Rudal SAM Kapal MRLF 6 Unit, Rudal C-802 4 Unit, Rudal C-705 6 Unit, Rudal *Yakhont* 2 Unit dan Rudal MICA VLS 6 Unit (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Grafik IV.2.

**Pemenuhan MEF Tahap II TNI AL Berdasarkan
Kejasama Industri Pertahanan Indonesia - Perancis**



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tidak banyak alutsista serta peralatan dan logistik lainnya yang dapat dipenuhi melalui kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis. Total jumlah keseluruhan yang dapat dipenuhi melalui kerjasama industri pertahanan dengan Perancis hanya sekitar 28% dari keseluruhan pengadaan. Alutsista yang dapat dipenuhi melalui penyelenggaraan kerjasama industri pertahanan dengan Perancis antara lain Upgrade FCS SSM Rudal Exocet yang pembeliannya dilakukan sejak 2016 – 2018 sebanyak 30 *Unit*, kemudian rudal MICA VLS sebanyak 6 *Unit* dan

Full Combat Mission Helikopter AKS AS565 MBe Panther 4 Paket (SIPRI Arms Transfers Database, 2020).

IV.3.B. TNI AU

Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis dalam bidang kedirgantaraan sebetulnya cukup banyak dilakukan oleh PT. DI dengan Airbus Helicopters. Meski begitu, hal tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan alutsista TNI AU. Perancis sebetulnya telah beberapa kali mengajukan penawaran untuk lebih dapat berkontribusi tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI melainkan juga membantu kemajuan industri pertahanan Indonesia, salah satunya dengan melakukan penawaran Jet Tempur *Rafale* milik Dessault Perancis. Namun hal tersebut masih melalui pertimbangan dari pemerintah Indonesia. Berikut adalah data mengenai alutsista TNI AU yang dibutuhkan dalam pembangunan MEF Tahap II yang mampu dipenuhi melalui kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis.

Tabel IV.5.
Kebutuhan Alutsista TNI AU Pada Pembangunan MEF Tahap II Yang Berhasil Dipenuhi Melalui Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis

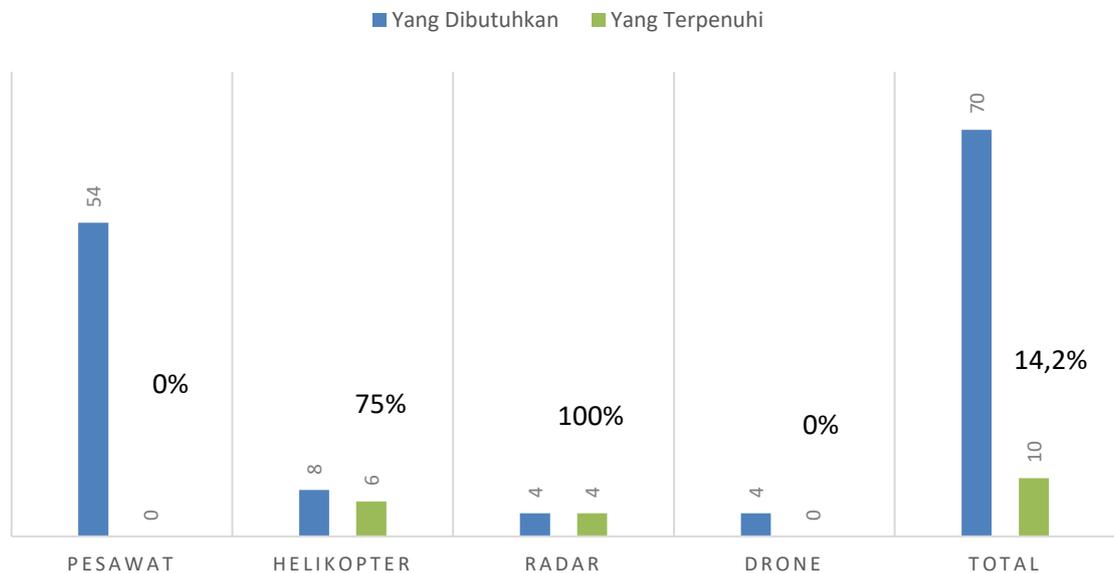
| No. | Jenis Alutsista | Jumlah Yang Dibutuhkan | Jumlah Yang Terpenuhi | Keterangan |
|-----|-----------------|------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Pesawat | 54 Unit | - | |
| 2. | Helikopter | 8 Unit | 6 Unit | Helikopter EC725 atau H225M Produksi Airbus & PT.DI |
| 3. | Radar | 4 Unit | 4 Unit | Radar Master-T Produksi Thales Perancis |
| 4. | Drone | 4 Unit | - | - |
| 5. | Total | 70 Unit | 10 Unit | - |

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Kebutuhan alutsista TNI AU dalam Pembangunan MEF Tahap II diantaranya meliputi pengadaan pesawat pengganti F-5 12 *unit*, Pesawat NC-212i 9 *unit*, Pesawat CN-295 *Special Mission* 1 *unit*, Pesawat Angkut Berat 4 *unit*, Pesawat G-120 TP (Grob) 6 *unit*, Pesawat KT-1B 10 *unit*, Pesawat *Multi Purpose Amphibious* 4 *unit*, Helikopter Angkut Berat 6 *unit*, Helikopter Angkut VVIP 2 *unit*, Radar GCI 4 *unit*, PSU 3 Satbak, PTTA/UAV 4 *unit*, Bom (P-250 dan P-100) 2.000 *unit*, Rudal Jarak Sedang 1 Satbak, kelengkapan Radar 16 set dan senjata Pesawat T-50i 12 set, serta modernisasi Pesawat C-130 H/HS 8 *unit* (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Grafik IV.3.

Pemenuhan MEF Tahap II TNI AU Berdasarkan Kejasama Industri Pertahanan Indonesia - Perancis



Sumber : Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Dari keseluruhan kebutuhan TNI AU, Kerjasama dengan industri pertahanan Perancis hanya mampu memenuhi 15%. Peralnya, Indonesia masih

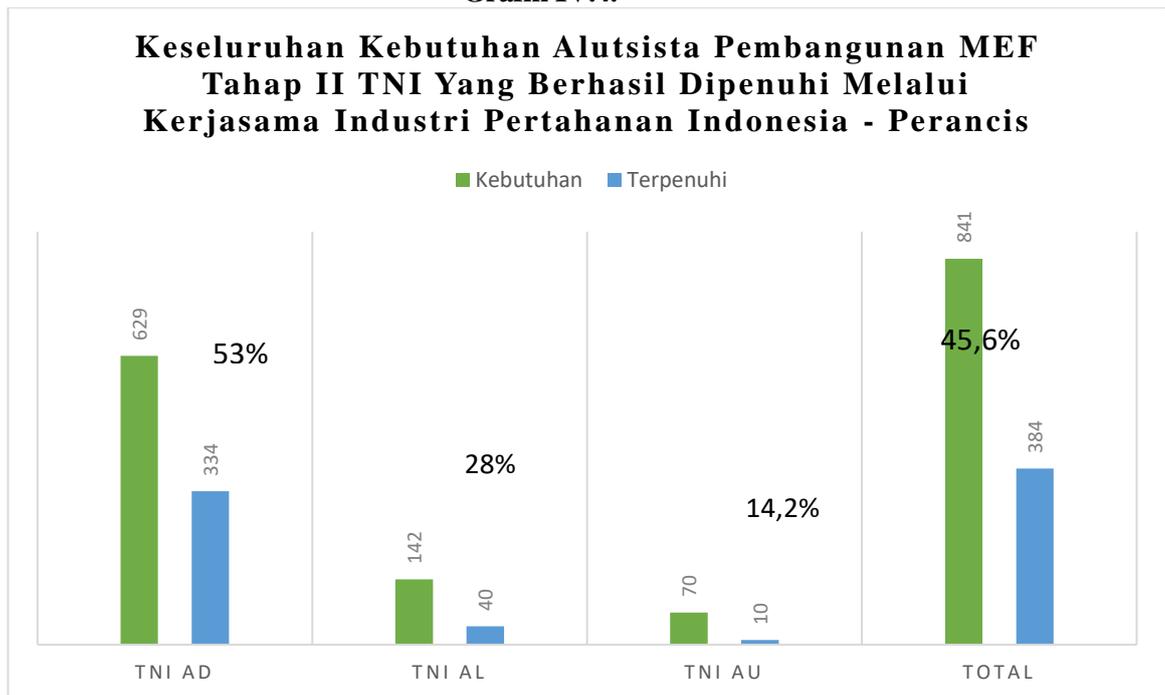
belum berminat untuk menggadaikan keperayaanya perihal pertahanan udara khususnya mengenai pengadaan jet tempur, selain pada produk milik Amerika Serikat dan Russia, meskipun pada kenyataannya pengadaan alutsista dari Amerika Serikat dan Russia tidak bisa diharapkan untuk mendukung program MEF yang dimana sasarannya adalah menuju pada kemandirian industri pertahanan.

IV.4. Efektivitas dalam Memenuhi Target MEF Tahap II

Mengacu pada pengukuran tiga matra pertahanan diatas, kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis dalam memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan darat Indonesia berada pada angka yang cukup besar yakni sekitar 53%. Artinya, pada sektor pertahanan darat, pemerintah Indonesia telah berani mengambil cukup banyak manfaat dari industri pertahanan nasional yang melakukan kolaborasi dengan industri pertahanan Perancis. Meskipun praktek pada industri pertahanan nasional dalam menciptakan alutsista tidak hanya bekerjasama dengan Perancis, namun dapat terlihat bahwa industri pertahaan Perancis telah mengabdikan cukup banyak kemampuannya untuk mendukung industri pertahanan Indonesia. Cukup mengecewakan jika dilihat bahwa kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis belum cukup besar kapabilitasnya dalam memenuhi kebutuhan pertahanan laut yang hanya berada pada angka 28% dan pertahanan udara yang berada pada angka 25%. Pada kenyataannya, Perancis telah melakukan penawaran mengenai beberapa alutsista yang dapat mendukung kedua sektor pertahanan tersebut, melalui forum dialog IFDD, industri pertahanan Indonesia pada kenyataannya cukup tertarik dengan penawaran *Transfer of Technology* (ToT) Jet

Tempur *Rafale* milik Dessault Perancis dan Kapal Selam *Scorpene* milik DCNS Perancis, namun pemerintah Indonesia masih terus melakukan pertimbangan mengenai hal tersebut. Pada sektor pertahanan udara, pemerintah Indonesia masih setia dengan produk keluaran Amerika Serikat dan Rusia dimana kita sama – sama tahu kedua negara tersebut sangat pelit teknologi, artinya hanya sebatas pengadaan saja. Lalu bagaimana dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai pengadaan dari luar negeri harus disertai *Local Content* atau *Offset* sebesar 85%, maka untuk memenuhinya hanya perlu dimanifestasikan pada imbal dagang.

Grafik IV.4.



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Jika dihitung secara keseluruhan, kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis cukup besar pengaruhnya dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam pembangunan MEF Tahap II TNI yakni berada pada angka 45,6%. Efektif

atau tidaknya kegiatan kerjasama industri pertahanan tersebut akan dikaji dengan menggunakan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dimana dikatakan suatu kegiatan atau organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai dengan indikator pengukuran berupa Pendekatan Sumber (*Resource Approach*), Pendekatan Proses (*Process Approach*) dan Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*) (Martani & Lubis, 1987).

Tabel IV.6.
Efektivitas Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia Perancis dalam Memenuhi MEF 2015-2019

| Indikator | Pengaplikasian | Penjelasan |
|--|---|---|
| Pendekatan Sumber (<i>Resource Approach</i>) : Keberhasilan dalam memperoleh sumber daya fisik maupun non-fisik | Sumber Daya Fisik : Industri pertahanan Perancis mampu menyediakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri pertahanan Indonesia guna mendukung kebutuhan militer Indonesia. Sumber Daya Non-Fisik: Industri Pertahanan Perancis terbuka dalam memberikan tidak hanya <i>transfer</i> teknologi melainkan juga <i>transfer of knowledge</i> kepada industri pertahanan Indonesia dalam hal ini seperti cara produksi, pemeliharaan dan perawatan, dsb | Jika diukur melalui pendekatan ini, kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis dapat dikatakan efektif dalam memenuhi MEF karena efeknya tidak saja terbatas pada pemenuhan kebutuhan alutsista Indonesia, melainkan mampu mendukung keberhasilan Indonesia dalam melakukan revolusi militer melalui program MEF dan melakukan tranformasi militer seperti yang dicita – citakan. |
| | Pelaksanaan <i>Transfer of Technology</i> : Dalam Proses pemenuhan MEF, industri pertahanan Perancis memberikan | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Pendekatan Proses (<i>Process Approach</i>): Keberhasilan dalam Proses pelaksanaan program sesuai dengan mekanisme organisasi</p> | <p>keuntungan <i>Offset</i> bagi industri pertahanan Indonesia berupa <i>Transfer of Technology</i> dan <i>Transfer of Knowledge</i> dalam setiap pengadaan alutsista dari Perancis, hal ini sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan MEF.</p> <p>Pelaksanaan <i>Defence Diplomacy</i>:</p> <p>Pelaksanaan defence diplomacy merupakan bagian dari mekanisme yang ditetapkan Indonesia dalam membangun MEF. Indonesia dengan Perancis setiap tahunnya menyelenggarakan Indonesia France <i>Defence Dialogue</i> (IFDD), dimana didalamnya terdapat <i>Defence Industry & Procurement Sub-committee</i> untuk kemudian merencanakan dan mengawasi setiap program kerjasama industri pertahanan kedua negara.</p> | <p>Pengukuran dengan pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis dapat dikatakan efektif karena dalam setiap proses pelaksanaan kerjasama telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Indonesia dalam pemenuhan MEF.</p> |
| <p>Pendekatan Sasaran (Goals Approach): Keberhasilan dalam mencapai hasil</p> | <p>Alutsista yang dapat Memenuhi Kebutuhan Pembangunan MEF :</p> <p>TNI AD : 53% TNI AL: 28% TNI AU : 14,2% TOTAL : 45.6%</p> | <p>Dilihat melalui pendekatan ini, pelaksanaan kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis belum mencapai hasil yang cukup untuk kemudian dapat dikatakan efektif. Meskipun pada sektor pertahanan darat kerjasama ini berhasil mencapai 53%, dimana pencapaian tersebut merupakan pencapaian yang cukup tinggi, namun tidak dengan sektor pertahanan lainnya yakni pertahanan darat dan udara yang masih harus lebih ditingkatkan. Setidaknya 50% dari</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | keseluruhan kebutuhan dapat terpenuhi, maka kemudian kerjasama tersebut dapat dikatakan efektif. |
|--|--|--|

Sumber : Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Mengacu pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis cukup efektif dalam memenuhi MEF tahun 2015-2019. Pasalnya, kerjasama tersebut mampu mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. MEF sendiri pada dasarnya merupakan bentuk dari *Revolution in Military Affairs* (RMA) yang sejalan dengan konsep yang dituangkan dalam US *Department of Defence's Office of Force Transformation* dimana dikatakan bahwa RMA didefinisikan sebagai sebuah proses dalam membentuk perubahan sifat perang dalam hal ini kompetisi militer dan kerjasama melalui serangkaian kombinasi dari konsep, kapabilitas, sumber daya manusia dan organisasi yang mengeksploitasi keunggulan bangsa dan melindungi bangsa dari kerentanan asimetris untuk mempertahankan posisi strategis bangsa dan membantu perdamaian dunia (US Department of Defence, Office of Force Transformation (OFT), 2004). Maka pada dasarnya sasaran yang ditetapkan dalam MEF sifatnya luas tidak hanya sebatas pada pencapaian postur ideal alutsista. Melalui MEF, pemerintah Indonesia mengharapkan terjadinya transformasi militer menjadi negara *autarky*, yakni negara dengan kemandirian pertahanan. Namun dengan keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, saat ini kerjasama internasional merupakan hal yang cukup penting bagi Indonesia. Indonesia kemudian mengarahkan Undang-Undang pertahanannya pada *Niche-Production Model* dimana hal ini dilakukan oleh negara

yang berupaya mengurangi ketergantungan luar negeri dengan mengembangkan kapasitas nasional melalui komitmen dalam melakukan investasi yang besar ke sektor industri pertahanan dan mengupayakan terjadinya transfer teknologi dari produsen senjata yang mapan (Widjajanto, 2012). Diplomasi pertahanan dalam industri pertahanan terus digencarkan dalam proses pemenuhan MEF, bukan hanya untuk mendapatkan manfaat fisik dalam hal ini teknologi maupun alutsista itu sendiri, melainkan manfaat untuk memberdayakan SDM untuk kemudian bisa memproduksi peralatan pertahanan yang sesuai dengan postur ideal pertahanan Indonesia.

Dengan Perancis, Indonesia rasanya mampu mengambil semua manfaat tersebut. Sejak kemitraan strategis yang disepakati pada tahun 2011, Perancis menyatakan dukungannya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara yang mandiri. Komitmennya tersebut diwujudkan dengan terbentuknya IFDD yang masih terus berjalan hingga saat ini. Melalui IFDD Indonesia dan Perancis kemudian dapat berdiskusi terkait kerjasama pertahanan sesuai dengan kebutuhan kedua negara. melalui IFDD, Perancis mendorong industri pertahanannya untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasionalnya. Cukup banyak kerjasama yang telah berjalan juga penawaran – penawaran yang masih dalam pertimbangan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara maju lainnya, Perancis merupakan negara yang cukup humble dalam membantu Indonesia. Sangat mustahil bagi Indonesia mengharapkan negara seperti Amerika Serikat, Russia dan China untuk mendukung industri pertahanan nasional dengan memberikan ToK maupun ToT. Kemudian negara

seperti Jerman, Belanda, Spanyol hingga Korea Selatan hanya mampu memberikan manfaat pada jenis alutsista tertentu. Dibandingkan harus melakukan pengadaan alutsista tanpa *local content* maupun *offset* dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Russia, seperti yang terbaru adalah dalam pengadaan jet tempur untuk pemenuhan alutsista MEF tahap II, Perancis dengan industri pertahanan yang mapan dan penguasaan teknologinya memberikan Indonesia kesempatan dalam mengembangkan industri pertahanan dari berbagai aspek, mulai dari pesawat, helikopter, kapal, hingga munisi. Meskipun jumlah alutsista yang dapat dipenuhi melalui kerjasama industri pertahanan Indonesia-Perancis dalam pembangunan MEF Tahap II belum mencapai 50% secara keseluruhan, namun penyelenggaraan kerjasama industri pertahanan ini telah banyak memberikan manfaat dalam memenuhi sasaran MEF. Oleh karena itu, kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis dapat dikatakan cukup efektif dalam memenuhi MEF 2015-2019. Namun, masih perlu dilakukan peningkatan yang besar dalam pengadaan alutsista khususnya pada sektor pertahanan laut dan udara.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Perancis ini sejalan dengan konsep kerjasama pertahanan yang diutarakan oleh Helen Milner dalam tulisannya berjudul *International Theories of Cooperation Among Nations Strengths and Weakness*, dimana dikatakan kerjasama sebagai sesuatu yang pada dasarnya harus mengarah pada ‘rewards’ untuk semua pihak/semua negara, tidak harus mendapat imbalan yang sama tetapi semua mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Meskipun Perancis tidak mendapat imbalan serupa dalam hal ini mengenai manfaat industri pertahanan, namun melalui kerjasama dengan Indonesia Perancis

mengambil manfaat dalam memenuhi kebijakan luar negeri nasionalnya dan prinsipnya dalam menjaga perdamaian dunia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, alasan utama Perancis dalam menjalin kerjasama yang saling mendukung dengan Indonesia didasari kepercayaan bahwa Indonesia memiliki prinsip yang sama untuk menjaga perdamaian dunia, sehingga kemudian Indonesia dianggap sebagai mitra strategis dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Perancis sejatinya telah terjalin cukup lama. Hubungan kedua negara tersebut dapat dikatakan hampir tidak pernah mengalami penurunan, melainkan semakin baik dan terus meningkat. Hubungan kedua negara merupakan hubungan saling mendukung dengan komitmen yang sama yakni menjaga perdamaian dunia. Perancis sangat mendukung dilakukannya pembangunan kapabilitas pertahanan Indonesia melalui *Minimum Essential Force* (MEF). Komitmen Perancis dalam mendukung peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia diwujudkan melalui Joint Statement on Strategic Partnership tahun 2011. Setelah kemitraan strategis tersebut, Perancis sangat aktif dalam membantu Indonesia memenuhi MEF salah satunya dengan mendorong kerjasama industri pertahanan. Perancis mendorong industri pertahanan nasionalnya untuk membantu meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam memproduksi alutsista.

Kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis dalam memenuhi MEF tahap II 2015-2019 dapat dikatakan cukup efektif. Kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis pada periode ini tidak saja memberikan manfaat fisik dalam hal ini pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, melainkan juga memberikan manfaaat non-fisik seperti terwujudnya sasaran – sasaran pembangunan MEF tahap II. Melalui kerjasama industri pertahanan dengan Perancis, Indonesia mampu memenuhi setidaknya 45% dari kebutuhan alutsista

TNI. Selain itu, melalui kerjasama dengan industri pertahanan Perancis, Indonesia mampu mengambil manfaat non-fisik lainnya seperti alih teknologi, dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang dan sasaran dari MEF dimana terwujudnya industri pertahanan yang maju, mandiri dan berdaya saing. Meskipun begitu, masih diperlukan peningkatan kerjasama pada sektor pertahanan laut dan udara, pada dasarnya Perancis telah melakukan penawaran yang dapat mendukung pertahanan laut dan udara Indonesia, namun penawaran ini masih terus dalam pertimbangan pemerintah Indonesia. Tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia, melihat penguasaan teknologi Perancis yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, pada sektor pertahanan udara, Indonesia tampaknya belum dapat meninggalkan jejak historisnya pada produk milik Russia dan Amerika Serikat, meskipun kedua negara tersebut tidak terbuka dalam alih teknologi. Sedangkan pada pertahanan laut, pemerintah Indonesia masih mempercayakan pada produk-produk milik Belanda yang sejak lama digunakan. Selain itu, kondisi industri pertahanan Indonesia sendiri belum cukup kuat untuk membangun kebutuhan pertahanan laut dan udara.

Yang terkini, pemerintah Indonesia melalui menteri pertahanan Prabowo Subianto, menyatakan akan lebih mempererat kembali kerjasama pertahanan dengan Perancis melalui *Defence Cooperation Agreement* yang akan segera ditandatangani. DCA yang sempat mandek dalam proses pembuatan draftnya, kini dipercepat pembuatannya oleh menteri pertahanan kedua negara, agar segera bisa ditanda tangani. Menteri pertahanan Indonesia menyadari pentingnya kerjasama pertahanan dengan Perancis yang terus mendukung kemajuan pertahanan

Indonesia, khususnya dalam memperkuat alutsista TNI dan memajukan industri pertahanan. Melalui kunjungan menteri pertahanan Indonesia ke Perancis, Menhan Prabowo berharap langkah tersebut dapat menjadikan industri pertahanan Indonesia menjadi bagian dari Global Production Chain produk alutsista (Permana, 2020).

B. Rekomendasi

Kerjasama dalam sektor pertahanan Udara dan Laut sangat perlu ditingkatkan, pemerintah harus mempertimbangkan impor alutsista yang tidak memberikan manfaat bagi kemajuan industri pertahanan nasional. Penguasaan teknologi yang dimiliki Perancis dalam berbagai jenis alutsista tidak perlu diragukan. Ada baiknya pemerintah Indonesia memanfaatkan keterbukaan Perancis dalam bidang teknologi ini untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional. Pemerintah kemudian perlu meningkatkan fasilitas industri pertahanan nasional untuk memproduksi alutsista laut dan udara seperti layaknya PT. Pindad yang telah berhasil melakukan produksi alutsista pertahanan darat secara mandiri. Dengan begitu, kesempatan Indonesia untuk mencapai kemandirian pertahanan dan menjadi bagian dari Global Production Chain akan semakin terbuka.

DAFTAR REFERENSI

DOKUMEN

France Diplomatie. (2018). *France and Indonesia Bilateral Relations*.

Kementerian Pertahanan RI. (1996). *Memorandum of Understanding/Arrangement in The Field of Defence Equipment, Logistics and Industry*. Jakarta: Kemhan RI.

Kementerian Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Kementerian Perahanan Indonesia.

Kementerian Pertahanan RI. (2012). *Pengaturan Teknis Tentang Kerjasama Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Menteri Pertahanan dan Urusan Veteran Republik Perancis*. Perancis: Kementerian Pertahanan RI.

Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Minimum Essential Force TNI 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Minutes of Meeting of 3rd Indonesia - France Defence Dialogue*. Jakarta: Kemhan RI.

Kementerian Pertahanan RI. (2016). *Laporan Hasil Pertemuan IFDD ke-4*. Jakarta: Kemhan RI.

Kementerian Pertahanan RI. (2016). *Minutes of Meeting 4th Indonesia - France Defence Dialogue*. Jakarta: Kemhan RI.

Kementerian Pertahanan RI. (2017). *Tindak Lanjut LoI Enhancing Defence Cooperation RI - Perancis*.

Kementerian Pertahanan RI. (2017). *Tindak Lanjut LoI Pertahanan RI - Perancis*.

Kementerian Pertahanan RI. (2019). *Minutes of Meeting of The 7th Indonesia - France Defence Dialogue*. Jakarta: Kemhan RI.

Ministere Des Armees France. (2018). *France and Security in the Indo-Pasific*.
Commander Jerome Baroe.

SIPRI Arms Transfers Database. (2020). *Transfers of Major Weapons: Deals with deliveries or orders made for 2015 to 2018*. SIPRI.

BUKU

Campbell, J. P. (1977). *On The Nature of Organizational Effectiveness*. San Francisco: Jossey Bass.

Cohen, E. (2009). Change and Transformation in Military Affairs. In B. Loo, *Military Transformation and Strategy: Revolution in Military Affair and Small States* (p. 16). London: Routledge.

Hundley, R. O. (1999). *Past Revolutions Future Transformations : What can the history of revolutions in military affairs tell us about transforming the U.S. military?* Santa Monica: CA : RAND.

Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony*. New Jersey: Princeton University Press.

Lubis, M. d. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Matthews, R. (2001). *Managing the Revolution in Military Affairs*. New York: Palgrave.

- Pasolog, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Schneider, B. R., & Grinter, L. E. (1998). *Battlefield of The Future 21st Century Warfare Issues*. Washington D.C: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Sloan, E. C. (1965). *Military Transformation and Modern Warfare*. London: Praeger Security International.
- U.S. Congress of Technology Assesment. (1992). *Lessons in Restructuring Defense Industry: The French Experience*. Washington DC: June.

JURNAL

- Adiyanti, E. P. (2016). Kerjasama Pertahanan Indonesia - Korea Selatan dalam Pengembangan Pertahanan. *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 15.
- Amrullah, M. R. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Turki: Studi Kasus Kerjasama Industri Pertahanan. *Jurnal Pertahanan*, 151.
- Belin, J., Hartley, K., Lefeez, S., Linnenkamp, H., Lundmark, M., Masson, H., . . . Ungaro, A. R. (2017). *Defence Industrial Link Between The EU and The US*. Armament Industry European Research Group.
- Campbell, J. P. (1977). *On The Nature of Organizational Effectiveness*. San Francisco: Jossey Bass.
- Djarwono, L. F. (2017). Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia: Menuju Pemenuhan Trget MEF Atau Sekedar Menuju Arm Candy? 25.
- Karomah, T. (2017). Kerjasama Pertahanan Indonesia - Jerman Melalui Deklarasi Jakarta Tahun 2012 - 2016. *JOM Fisip Universitas Riau*.

- Luthfi, R. M. (2012). Implementasi Revolution in Millitary Affairs (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia. *Tesis Universitas Indonesia*, vi.
- Milner, H. (1992). *International Theories of Cooperation Among Nations Strengths and Weaknesses*. Retrieved 2019, from Jstor: https://www.jstor.org/stable/2010546?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents
- Muradi. (2008, September 3). *Praktik - Praktik Defense Offset di Indonesia*. Retrieved from http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/praktik_defense_offset_indonesia.pdf
- Rahmadeni, F. S. (2019). Kemitraan Strategis Indonesia - Perancis melalui Joint Working Group on Tourism Sebagai Upaya Peningkatan Pariwisata di Indonesia Tahun 2013 - 2017. *Jurnal Fisip Universitas Riau*, 7.
- Rahman, A. F., Anwar, S., & Sumari, A. D. (2015). Analisis Minimum Essential Force (MEF) Dalam Rangka Pembangunan Cyber-Defense. *Jurnal Pertahanan*, 63.
- UK Ministry of Defence. (2014, November). *Joint Doctrine Publication 0-01 UK Defence Doctrine*. Retrieved 2019, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389755/20141208-JDP_0_01_Ed_5_UK_Defence_Doctrine.pdf
- US Department of Defence, Office of Force Transformation (OFT). (2004). *Elements of Defence Transformation*. Washington, DC: Office of The Secretary of Defence.

Wibowo, R. D. (2016). Permasalahan dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan. 43.

Widjajanto, A. (2012). Revolusi Teknologi Militer dan Kemandirian Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 77.

WEBSITE

AIRBUS. (n.d.). *Airbus Helicopters*. Retrieved from Airbus.com:
<https://www.airbus.com/helicopters.html>

AIRSPACE REVIEW. (2018, Januari 9). *PTDI Serahkan Tiga Unit Helikopter AS555 AP Fennec ke Kemhan*. Retrieved from AIRSPACEREVIEW.COM:
<https://www.airspace-review.com/2018/01/09/ptdi-serahkan-tiga-unit-helikopter-as555-ap-fennec-ke-kemhan/>

Bappenas RI. (2019). *RPJMN 2004 - 2009*. Retrieved September 19, 2019, from Kementerian PPN/Bappenas:
<https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/RPJMN%202010-2014.pdf>

Bappenas RI. (2019). *RPJP 2005 - 2025*. Retrieved September 19, 2019, from Kementerian PPN/Bappenas:
https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf

Cuoco, C. A. (2010, April). *The Revolution in Military Affairs: Theoretical Utility and Historical Evidence*. Retrieved from
<https://www.files.ethz.ch/isn/115259/rieas142b.pdf>

Databoks. (2017). *Berapa Investasi Perancis di Indonesia?* Retrieved from databoks.katadata.co.id:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/30/berapa-investasi-prancis-di-indonesia>

Dinas Kelaikan Angkatan Darat. (2019, Agustus 12). *ANOVA, Tank andalan Batalyon Infanteri Mekanis*. Retrieved from Dislaik TNI AD: <http://dislaik-tniad.mil.id/index.php/berita/detail/anoa-tank-andalan-batalyon-infanteri-mekanis>

Fleurant, A., Kuimova, A., Tian, N., Wezeman, P. D., & Wezeman, S. T. (2018, December). *The SIPRI Top 100 Arms Producing and Military Services Companies 2017*. Retrieved from SIPRI.org: https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/fs_arms_industry_2017_0.pdf

Global Security. (2013, May 01). *France - Military Industry*. Retrieved from globalsecurity.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/fr-industry.htm>

Ibrugger, L. (1998, November). *The Revolution in Military Affairs*. Retrieved from IWS-The Information Warfare Site: <http://www.iwar.org.uk/rma/resources/nato/ar299stc-e.html>

Indo Militer. (2015, April 20). *AS565 MBe Panther TNI AL Akan Dibekali Teknologi HELRAS DS-100 Dan Peluncur Torpedo*. Retrieved from [Indomiliter.com](http://indomiliter.com): <https://www.indomiliter.com/as565-mbe-panther-tni-al-akan-dibekali-teknologi-helras-ds-100-dan-peluncur-torpedo/>

Indo Militer. (2015, Agustus 26). *Elang Recon Vehicle 4x4: Rantis Intai Merek Dalam Negeri Citarasa Perancis*. Retrieved from [Indomiliter.com](http://indomiliter.com):

<https://www.indomiliter.com/elang-recon-vehicle-4x4-rantis-intai-merek-dalam-negeri-citarasa-perancis/>

Indo Militer. (2017, Maret 18). *Beda Penyebutan H225 Caracal dan EC725 Super Cougar*. Retrieved from Indomiliter.com: <https://www.indomiliter.com/beda-penyebutan-h225-caracal-dan-ec725-super-cougar-mana-yang-benar/>

Indo Militer. (2017, Maret 03). *Tahun Ini Juga, PT. DI Siap Tuntaskan Seluruh Pesanan Helikopter Fennec Untuk TNI AD*. Retrieved from Indomiliter.com: <https://www.indomiliter.com/tahun-ini-juga-pt-di-siap-tuntaskan-seluruh-pesanan-helikopter-fennec-untuk-tni-ad/#more-13007>

International Trade Administration Department of Commerce USA. (2016, July 18). *French Defense Overview*. Retrieved from Export.gov: <https://www.export.gov/article?id=French-Defense-Business-Overview>

Kantor Staff Presiden. (2017, Maret 29). *Indonesia - Perancis Sepakat Tingkatkan Kerjasama*. Retrieved from ksp.go.id: <http://ksp.go.id/indonesia-prancis-sepakat-tingkatkan-kerjasama/>

KBRI Paris. (2018). *Hubungan Bilateral Perancis - Indonesia*. Retrieved from Kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/paris/id/pages/prancis-indonesia_/624/etc-menu

Kedutaan Besar Perancis di Jakarta. (2015, January 20). *Wawancara Ibu Duta Besar dengan The Jakarta Post tanggal 16 Desember 2014*. Retrieved from Ambafrance.org: <https://id.ambafrance.org/Wawancara-Ibu-Duta-Besar-dengan>

Kementerian Perindustrian RI. (2017, Maret 30). *Indonesia - Perancis Siap Kolaborasi Kembangkan Vokasi dan IKM*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: <https://kemenperin.go.id/artikel/17353/Indonesia-Perancis-Siap-Kolaborasi-Kembangkan-Vokasi-dan-IKM->

Kementerian Pertahanan RI. (2012, August 30). *PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG KAJI ULANG STRATEGI PERTAHANAN (STRATEGIC DEFENCE REVIEW) 2011*. Retrieved September 2019, 2019, from Kementerian Pertahanan Indonesia: https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/8-2012gab_0.pdf

Kementerian Pertahanan RI. (2014, January 20). *Buku Putih Pertahanan 2008*. Retrieved from kemhan.go.id: <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf>

KKIP RI. (2018). *Industri Pertahanan*. Retrieved from kkip.go.id: https://kip.byproweb.co.id/www_kkip/wp-content/uploads/2018/10/Direktori-Indhan-Revisi-11-Okt-2018-Bagian-2.pdf

Kompas. (2016, November 24). *Airbus Serahkan 3 Helikopter AS565 Pesanan TNI AL*. Retrieved from Kompas.com: <https://tekno.kompas.com/read/2016/11/24/12310077/airbus.serahkan.3.helikopter.as565.pesanan.tni.al>

- Kompas. (2017, Maret 15). *PTDI Kirim Ekor dan Badan Helikopter H225/H225M ke Perancis*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2017/03/15/11122961/ptdi.kirim.ekor.dan.badan.helikopter.h225.h225m.ke.perancis>
- MBDA. (2019). *About MBDA*. Retrieved from MBDA Missile Systems: <https://www.mbda-systems.com/about-us/>
- Permana, E. (2020, Januari 14). *Indonesia Jajaki Kerjasama Industri Pertahanan dengan Perancis*. Retrieved from aa.com: <https://www.aa.com.tr/id/nasional/indonesia-jajaki-kerja-sama-industri-pertahanan-dengan-perancis/1701670>
- Pindad. (2019). *Komodo 4X4 Missile Launcher*. Retrieved from Pindad.com: <https://pindad.com/komodo-4x4-missile-launcher>
- PINDAD. (2019). *Komodo 4X4 Recon*. Retrieved from Pindad.com: <https://pindad.com/tactical-vehicle-4-x-4--hd-v1>
- PR Newswire. (2019, April 23). *Thales dan PT Len Berkolaborasi untuk Mendukung Pengembangan Radar - Industri Strategis bagi Pertahanan Indonesia*. Retrieved from id.prnasia.com: <https://id.prnasia.com/story/35198-5.shtml>
- Raditya, R. (2017, Maret 6). *Enam "SHERPA 2" Perkuat Indobatt*. Retrieved from militer.or.id: <https://militer.or.id/1879/enam-sherpa-2-perkuat-indobatt/>
- Robb, D. (2000, December 6). *Thomson-CSF Changes name to Thales*. Retrieved from Aerospace Online: <https://www.aerospaceonline.com/doc/thomson-csf-changes-name-to-thales-0001>

- Rohman. (2016, November 23). *Airbus Helicopters Kirim Tiga Unit Pertama AS565 MBe Panther ke Indonesia*. Retrieved from Jakarta Greater: <https://jakartagreater.com/airbus-helicopters-kirim-tiga-unit-pertama-as565-mbe-panther-ke-indonesia/>
- Stone-Resneck, D. (2009, February 4). *France Appoints its First Envoy to ASEAN*. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2009/02/04/france-appoints-its-first-envoy-asean.html>
- Thales Group. (2019). *Defence in Indonesia*. Retrieved from thalesgroup.com: <https://www.thalesgroup.com/en/countries/asia-pacific/indonesia/defence-indonesia>
- TheJakartaPost. (2011, November 10). *Schneider Electric to Build New Plant*. Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2011/11/10/schneider-electric-build-new-plant.html>
- Tresor Direction Generale. (2019). *France in ASEAN Annual Economic Report 2019*. Retrieved from Tresor Economic France: <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/8158f354-1a90-4542-8a7f-7411e2d53201/files/f6d2e8b6-cccb-41d6-867b-ee13b76a3b77>
- Wolters, O. W., Mohamad, G. S., Leinbach, T. R., Adam, A. W., McDivitt, J. F., & Legge, J. D. (2019). *Indonesia*. Retrieved from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Indonesia>

Wonderful Indonesia. (2016, Oktober 28). Bidik Wisman, Kemenpar Adakan Joint of Group dengan Perancis. Retrieved from Sportourism: <https://wonderful-indonesia.sportourism.id/news/bidik-wisman-kemenpar-adakan-joint-of-group-dengan-prancis>

Ziyadi, A. (2017, Februari 10). Kementerian Pertahanan Borong Lagi Meriam Caesar 155mm dari Perancis. Retrieved from MiliterMiliter.com: <https://militermeter.com/kementrian-pertahanan-borong-lagi-meriam-caesar-155-mm-dari-perancis/>

WAWANCARA

Kol. Udara Dedy Laksmono, S. S. (2019, Desember 9). Kepala Subdit Imbal Dagang Kendungan Lokal dan Offset. (M. Davina, Interviewer)